



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

BERKAH EKONOMI SYARIAH

Industri dan keuangan syariah Indonesia kian berkembang. Sejumlah keunggulan dan capaian jadi berkah dalam menopang ekonomi nasional. Saatnya memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah, agar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia bukan lagi impian.



Daftar Isi



Bertepatan dengan bulan Ramadan, Media Keuangan mengangkat isu Ekonomi Syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Untuk mewujudkannya, ekonomi syariah Indonesia perlu didorong lebih optimal. Potensi ini kami gambarkan dengan lentera. Cahaya pada lentera menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia berpotensi besar menyinari perekonomian nasional, meski saat ini belum optimal tercapai.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiani. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Riva Setiara, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Sri Moedji Sampumanto, Budi Sulistiyo. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Ferdian Jati Permana, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadi, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Indonesia Mesin Ekonomi Syariah Dunia

20 Infografis

22 Tumbuh Merekah Keuangan Syariah

25 Modal Besar Memimpin Pasar

27 Agar Ekonomi Syariah Kian Merekah

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 Kisah Pendidikan di Pedalaman

FIGUR

34 Sehati dengan Akuntansi

OPINI

37 Berimbang Pahami Utang Negara

OPINI

40 Memaknai Sistem Perlindungan Sosial

POTRET KANTOR

42 Membuka Jalan Talenta Kepemimpinan

PROFESI

44 Sabung Nyali Demi Negeri

REGULASI

46 Masuk Kriteria Bentuk Usaha Tetap, Orang dan Badan Asing Wajib Miliki NPWP

GENERASI EMAS

48 Energi untuk Bumi

BUGAR

51 Mengontrol Gula Darah dengan Diet DM

RENUNGAN

52 Meninggal (Kan)

BUKU

53 Mari Melihat Dunia Yang Sesungguhnya

LOKAL

54 Mencicipi Bau Peapi dari Sulawesi

FINANSIAL

56 Persiapan Keuangan Menjelang Ramadan

“MOBIL MURAH!
SEGERA TRANSFER DP KE REKENING SAYA YA”

⚠ Jangan sampai tertipu!

Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening bendahara, bukan atas nama pribadi • Tidak ada *down payment* atau DP untuk pembelian lelang • Apabila menemukan selebaran atau penawaran melalui telepon yang mencurigikan, segera hubungi *call center* DJKN atau KPKNL terdekat.

Informasi & kontak resmi layanan DJKN



1500991

situs | www.djkn.kemenkeu.go.id



@ditjenkn



@DitjenKN



DitjenKekayaanNegara

Dari Lapangan Banteng

Mendorong Ekonomi Syariah di Tanah Air

Sebagai negara dengan persentase populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa dibilang sedikit terlambat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan resmi dengan prinsip syariah baru berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun demikian, memasuki dekade ketiga ini, sudah semakin banyak lembaga keuangan syariah berkembang baik berupa bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan syariah. Melihat perkembangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 membentuk Dewan Syariah Nasional yang beranggotakan ulama ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi. Melalui dewan ini, MUI melakukan kajian-kajian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga turut meramaikan pasar keuangan syariah di Indonesia. Sejak tahun 2008, pemerintah telah mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yaitu surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai sumber pembiayaan bagi APBN, sebagian besar penerbitan Sukuk Negara berbasis pada proyek di mana dasar penerbitan Sukuk Negara ini adalah proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Contoh proyek yang dilakukan



adalah pembangunan dan pengembangan gedung kampus, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan beberapa Taman Nasional dan pengembangan madrasah. Hal ini sejalan dengan karakteristik keuangan syariah yang mengharuskan keterkaitan antara instrumen keuangan dan sektor riil.

Untuk memperluas basis investasi dan inklusi keuangan, pemerintah juga telah menyediakan Sukuk Negara Ritel yang diperuntukkan bagi investor perorangan. Dengan imbalan yang memadai, Sukuk Ritel menjadi alternatif instrumen untuk berinvestasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dana berbasis syariah.

Selama sepuluh tahun, total pemegang Sukuk Ritel telah mencapai lebih dari 200 ribu orang.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan Green Global Sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek dengan kriteria bersahabat dengan kehijauan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, pariwisata hijau dan bangunan hijau. Green Sukuk yang memperlihatkan kepedulian pemerintah pada *climate change* ini diterbitkan pada tahun 2018 dan merupakan Green Sukuk pertama di dunia yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dengan berbagai capaian *creative financing* dari Sukuk Negara ini, pemerintah telah mendapatkan banyak apresiasi yang ditandai dengan diraihnya lebih dari 29 penghargaan bertaraf internasional dari berbagai lembaga antara lain “Islamic Issue of the Year” dan “SRI Capital Market Issue of the Year” dari International Financing Review Asia di Hong Kong pada bulan Maret 2019.

Melalui sukuk, pemerintah berperan aktif dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Tanah Air.

Nufransa Wira Sakti,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi



KERETA LAJU NEGARA MAJU

Moda Raya Terpadu (MRT) merupakan alat transportasi transit cepat yang baru saja diresmikan. Proyek pembangunan MRT yang terdiri dari 13 stasiun ini dimulai pada tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2019. Proyek ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Foto
Anas Nur
Huda

LESTARI WAYANG WONG SRIWEDARI



Lebih satu abad pertunjukan wayang wong Sriwedari Surakarta dipentaskan setiap malam. Walau hanya ramai pada hari-hari tertentu, tekad para lakon untuk melestarikan budaya kuat tumbuh dari dalam jiwa. Penokohan yang dijalankan setiap wayang di atas panggung telah tertulis dalam jalan cerita dan sekenario yang ditentukan. Baik peran antaganois ataupun protagonis, adalah bagian penting dalam menghidupkan harmonisasi cerita.



Foto
Tino Adi



14/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Spring Meetings IMF-WBG 2019

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengikuti rangkaian agenda *Spring Meetings* IMF-WBG 2019 yang diselenggarakan pada 12-14 April 2019 di Washington D.C, Amerika Serikat. Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan risiko global dan regional yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang akan melemah dan perdagangan internasional yang masih akan mengalami pelemahan. “Ada beberapa hal yang perlu untuk kita waspadai dalam mengelola dan menjaga ekonomi Indonesia. Menurut perkiraan, pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dan perdagangan internasional masih akan mengalami pelemahan,” paparnya. Selain itu, dalam pertemuan *Spring Meetings* ini juga dibahas mengenai risiko-risiko kemungkinan peningkatan cyber trap atau kerapuhan sektor keuangan yang berasal dari ekonomi digital. “Juga dibahas bagaimana koordinasi dari perpajakan internasional makin diperkuat. Ini akibat adanya digitalisasi di mana peranan *e-commerce* dan *digital economy* makin meluas dan akan makin meningkat. Banyak negara membahas aspek perpajakan tapi juga aspek perbaikan distribusi, kompetisi serta bagaimana menjaga kerahasiaan data dan meningkatkan proteksi data-data konsumen,” paparnya.

Selain pertemuan *Spring Meetings*, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga menghadiri

pertemuan G-20. Menkeu dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan ekonomi besar yang tergabung dalam negara G-20. Oleh karena itu, ia menegaskan supaya Indonesia berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonominya agar disegani di lingkungan global sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, membangun infrastruktur, menciptakan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia. Di sela-sela kunjungan kerjanya pada *Spring Meetings* IMF-WBG 2019, Menkeu juga menyempatkan diri untuk menghadiri beberapa agenda lainnya. Pertama, Menkeu bertemu dengan para filantropis Indonesia dan filantropis Bloomberg maupun filantropis lainnya yang diundang oleh Bloomberg di New York. Kedua, Menkeu bertemu mahasiswa di Columbia University baik yang didanai oleh beasiswa LPDP maupun non-LPDP yang dilanjutkan dengan bertemu seluruh penerima beasiswa LPDP di sekitar New York di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Ketiga, Menkeu berkesempatan memberi kuliah umum di Cornell University. Pada kesempatan tersebut, Menkeu membahas mengenai ekonomi digital, kebijakan yang sesuai untuk mengantisipasi perubahan teknologi, dan bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih siap menghadapi era digital.

27/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Program *Secondment* Diharapkan Tingkatkan Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan *secondment* antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). “Ide *secondment* di 2017 adalah upaya untuk memperkuat dalam meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan keuangan negara,” ucap Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuka Program Sinergi Reformasi DJP-DJBC-DJA Tahun 2019 di Aula Chakti Buddhi Bakthi, Rabu (27/03). Tahun 2019 menurutnya akan menjadi tahun yang berat bagi penerimaan negara. Namun kebutuhan pembangunan negara tidak akan berkurang. Untuk itu, program *secondment* antar unit pengembalian tanggung jawab penerimaan negara ini sangat penting. Ia berharap, kerjasama antar 3 unit Eselon I tersebut semakin harmonis dan mampu menggenjot penerimaan negara.



28/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

10 Tahun, PT SMI Diminta Tidak Berpuas Diri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara peringatan HUT 10 tahun PT SMI di Ritz Carlton Hotel, Kamis (28/03). Di pidatonya Menkeu berharap agar para pegawai serta jajaran pimpinan PT SMI atau disebut SMIs tidak mudah berpuas diri dengan seluruh capaiannya hingga saat ini. “Indonesia memiliki 267 juta jiwa, wilayah seluas 8.3 juta km², 17 ribu lebih pulau-pulau. Semua pelosok pulau di Indonesia masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan,” kata Menkeu di hadapan *stakeholders* PT SMI, Kamis (28/03). Acara yang dibuka dengan video Kisah Pandu, anak dari Nusa Tenggara Timur yang sangat senang dengan berbagai infrastruktur hadir di kota kecilnya, merupakan tugas serta amanah yang harus mampu diemban dengan sangat baik oleh PT SMI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan.

29/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Tarik PMK *e-Commerce*

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*) pada Jumat, (29/03) di Kantor Pusat Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi 4, Jakarta. “Hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi tenang, tidak lagi membuat spekulasi mengenai isu perpajakan di dunia digital,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Penarikan PMK ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar Kementerian/ Lembaga (K/L). Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan *e-commerce* tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.





29/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Jelang Batas Lapor SPT, Laporan SPT *Online* Naik

Menjelang akhir masa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung perkembangan proses pelaporan para Wajib Pajak (WP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi 4 dan KPP Pratama Jakarta Tebet. Menkeu tampak antusias bertemu dan mengajak diskusi beberapa WP yang sedang menyampaikan laporan SPT melalui *e-form*, Jumat (29/03). Seperti yang diketahui, masa akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP 31 Maret 2019, jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, bagi WP OP yang melaporkan SPT pada Senin, 1 April 2019 tidak akan dikenakan sanksi denda. “Hingga jam 1 hari ini, laporan yang sudah masuk, mencapai 10.324.265 laporan. Jumlah ini naik 9.4% dari tahun lalu,” jelasnya saat konferensi pers usai kunjungan.

05/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro Umum



Peresmian Fasilitas Penunjang Kinerja Pegawai di Medan

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto meresmikan dua fasilitas penunjang kinerja pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di wilayah Sumatera Utara, Jum’at (05/04). Dua fasilitas tersebut adalah *Fire Protection System* di Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan serta Rumah Susun (Rusun) Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam sambutannya, Sesjen menyampaikan harapan agar saat kondisi darurat, sistem dapat langsung berjalan demi keselamatan dan keamanan para pegawai dan lingkungan kantor. Selain sistem keselamatan, Sesjen Hadiyanto juga menekankan pentingnya tindakan-tindakan pencegahan terhadap bencana kebakaran. Setelah peresmian secara simbolis, acara dilanjutkan dengan peninjauan perangkat-perangkat *Fire Protection System*. Selain itu Sesjen juga meresmikan rusun negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah dinas pegawai di kota Medan.

05/04

Teks
Biro KLI

Foto
AFMGM



Poin Kesepakatan AFMGM 2019 di Thailand

Pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, sebagai Chairman ASEAN yang mengangkat tema “*Advancing Partnership for Sustainability*”. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memimpin delegasi Indonesia menghadiri acara Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Se-ASEAN tersebut tanggal 2-5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand. Elemen-elemen utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah: (i) konektivitas melalui peningkatan fasilitasi perdagangan dan investasi serta keterhubungan sistem pembiayaan dan pembayaran; (ii) ketahanan sistem keuangan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dan risiko keamanan siber; serta (iii) keberlanjutan melalui optimalisasi mekanisme pembiayaan pasar modal dan perbankan untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan *micro-insurance* untuk mendorong inklusi keuangan.



21/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Berharap Semangat Kartini Tertanam di Pegawai Perempuan Kemenkeu

Memperingati Hari Kartini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengadakan dialog dengan pegawai perempuan- Kartini Kementerian Keuangan serta dengan perwakilan pegawai milenial perempuan yang baru mulai bekerja di Kemenkeu. Menkeu membahas bagaimana mereka dibesarkan di keluarga masing-masing, memulai karier, tantangan dan harapan mereka, dan bagaimana menyikapi tantangan sebagai seorang perempuan yang bekerja di kantor dan juga sekaligus menjadi seorang anak/ibu/istri di rumah. Kartini tidak berjuang hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk perempuan-perempuan lain dalam memperoleh persamaan hak dan kesempatan untuk maju. Semangat itulah yang Menkeu lihat dan temui dari para Kartini Kemenkeu. Menkeu juga berharap semangat itu ada di hati dan pikiran seluruh perempuan Indonesia.

08/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Raih Penghargaan *The Most Inspiring Women*

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Inspiring Woman* pada acara Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Acara ini merupakan kerjasama antara Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Rakyat Merdeka yang ke-20 tahun dan Warta Ekonomi ke-30 tahun di Hotel Pullman Jakarta, Senin (08/04). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla dan diterima oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mewakili Menkeu. Dalam sambutannya, Fadel Muhammad selaku Komisaris Utama Warta Ekonomi menuturkan bahwa inti acara ini adalah ingin mendorong supaya Indonesia lebih maju pada sektor yang beragam. Pada kesempatan yang sama, Wapres RI Jusuf Kalla memberikan selamat atas penghargaan yang telah diraih oleh para pemenang, dan menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan tetap maju, aman dan kondusif.



Menjelang Pemilu, Neraca Perdagangan Positif

Pasca rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) atas neraca perdagangan Indonesia bulan Maret 2019, pemerintah memberikan optimisme terhadap kinerja neraca perdagangan yang mulai menunjukkan sinyal positif. Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityawara, sebelumnya telah memperkirakan neraca perdagangan Indonesia selama Maret 2019 akan surplus melanjutkan pencapaian serupa bulan sebelumnya yang terindikasi dari *current account deficit* (CAD) yang juga membaik.

Sebagaimana dikutip dari rilis resminya pada tanggal 15 April 2019, BPS mencatat kondisi neraca perdagangan Indonesia bulan Maret 2019 mengalami surplus sebesar US\$540 juta atau lebih tinggi dari surplus bulan Februari 2019 sebesar US\$330 juta. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan kondisi surplus ditopang nilai ekspor nonmigas sebesar US\$988,6 juta, sedangkan nilai ekspor

migas berada pada kondisi defisit dengan nilai US\$448,4 juta.

Namun demikian, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu *year-on-year*, nilai ekspor menurun sebesar 10,1%. Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan secara kumulatif Januari hingga Maret 2019 Indonesia mengalami defisit sebesar US\$190 juta yang dipicu oleh surplus nonmigas sebesar US\$1,15 miliar dan defisit migas US\$1,3 miliar.

Senada dengan rilis BPS, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah optimistis dengan kinerja neraca dagang. Meskipun pencatatan secara kuartal masih tertekan karena defisit pada Januari mencapai US\$1,16 miliar, tren neraca perdagangan mulai menunjukkan sinyal positif. Darmin berharap dengan membaiknya tren perdagangan tersebut akan diikuti dengan menurunnya CAD. Mendukung Darmin, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan

neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus memberikan bukti upaya menekan impor dan meningkatkan ekspor pemerintah telah menunjukkan keberhasilan. Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Benny Soetrisno, mengatakan, surplus neraca dagang yang terjadi saat ini harus dijaga dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dan penolong dari dalam negeri.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, mengatakan kondisi surplus neraca perdagangan terjadi karena masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang masa pemilu dan bulan puasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa saat ini yang perlu diwaspadai Indonesia adalah risiko eksternal dari potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

ekspor atau ekspor jasa kena pajak. Dan PMK yang kedua tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempertegas penetapan BUT sebagai subjek pajak luar negeri.

Teks Abdul Aziz

TOPIK LAIN

Isu perpajakan terkait penurunan tarif PPh Badan dan Pajak Kendaraan Bermotor muncul seiring dengan debat kontestasi Pemilu 2019. Keterangan Menkeu menyebutkan bahwa Kemenkeu terus mendorong DPR untuk menyelesaikan berbagai undang-undang yang dipandang perlu diperbaiki. Sementara itu, berita baik datang dari dunia internasional. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut,

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah Finance Asia.

Di sisi lain, pada pertengahan April, Kemenkeu telah mengeluarkan dua beleid di bidang perpajakan. Pertama, beleid PMK terkait perluasan fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen bagi industri jasa yang melakukan kegiatan

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

- www.kemenkeu.go.id
- KemenkeuRI
- @KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- majalahmediakeuangan



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat optimisme Anda terkait langkahnegara kendalikan neraca perdagangan dan CAD



Like

Reply



@shabrinanoviyanti Pemerintah melakukan impor tidak hanya untuk kepentingannya saja tetapi juga untuk masyarakat. Untuk mengurangi deficit tersebut bisa kita lakukan sebaga masyarakat dengan cara lebih cinta produk dalam negeri, mengurangi barang impor yang tidak terlalu penting.



@ketrinke_ Dibutuhkan upaya yang bersifat structural dan fundamental untuk memperkuat ekonomi khususnya di kegiatan dalam negeri, upaya ini harus mengarah pada pemanfaatan sebesar-besarnya potensi dalam negeri.



@deemas28 sebagai warga negara yang mendukung pemerintahnya, yuk dukung produk lokal dan jelajahi dulu pariwisata dlam negeri.



@KemenkeuRI Sampaikan optimisme kamu terhadap potensi ekonomi syariah Indonesia agar dapat menjadi pusat ekonomi syariah dunia di masa depan!



Like

Reply



@widi_yantoro Fashion syariah disesuaikan dengan budaya indonesia akan menjadikan indonesia pusat fashion muslim dunia :)



@Julianajaya7 Ekonomi syariah akan maju pesat jika semua orang tau akan keuntungan yang diberikan banyak perbedaan dengan bank konvensional banyak manfaat dan keberkahannya yang jauh dari unsur riba pasti ekonomi syariah akan menguasai dunia



@Wahid_Arifin1 Dengan populasi penduduk muslim di Indonesia saya yakin Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah di masa depan pajak.



INDONESIA MESIN EKONOMI SYARIAH DUNIA

Dalam waktu dekat, Indonesia akan mempunyai Halal Distrik di kawasan Gelora Bung Karno. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Halal Park, cikal bakal Halal Distrik, pada pertengahan April lalu. Distrik yang akan dibangun di atas lahan seluas 21.000 meter persegi tersebut, diperkirakan rampung dalam dua tahun ke depan. Nantinya, Halal Distrik diharapkan bisa menjadi ekosistem bagi para pelaku industri halal di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, ekonomi syariah Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Hal ini ditopang oleh besarnya Populasi Muslim Indonesia. State of The Islamic Economic Report 2018/19 menyebutkan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 13 persen populasi muslim dunia. Dari jumlah tersebut, Indonesia berpotensi jadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah dunia.

Sejalan dengan itu, Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 memaparkan kontribusi ekonomi syariah dalam menopang perekonomian nasional. Keberadaan ekonomi syariah diketahui bisa menyumbang USD3,8 miliar Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Tidak hanya itu, ekonomi syariah juga mampu menarik USD1 miliar investasi asing secara langsung, serta membuka 127 ribu lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Permata terpendam

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menuturkan berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI), Indonesia saat ini berada di peringkat

Salah satu pusat perbelanjaan busana muslim

Foto
Resha Aditya Pratama

ke-10 atau naik satu peringkat dari tahun sebelumnya. “(Peningkatan ini) dikarenakan terdapat pertumbuhan di setiap industri yang memberikan pengaruh signifikan pada ekonomi syariah di Indonesia,”ungkapnya.

Sebut saja, sektor pariwisata halal Indonesia yang baru-baru ini menempati peringkat pertama dalam Global Muslim Tourism Index 2019. Selanjutnya pada sektor *modest fahion*, GIEI menempatkan Indonesia di peringkat kedua, setelah Uni Emirat Arab. Sementara dari sisi perilaku, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling demawan menurut Charity Aid Foundation World Giving Index 2018. Artinya potensi zakat dan wakaf yang bisa dihimpun dan disalurkan masih cukup besar.

Potensi perkembangan ekonomi syariah juga didukung oleh kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sebesar USD218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh sebesar 5,3 persen Coumponded Average Growth Ratio (CAGR) dan mencapai USD330,5 miliar pada 2025 mendatang.

Mencermati hal ini, Bambang Brodjonegoro menuturkan potensi tersebut mampu menempatkan Indonesia sebagai Global Halal Economy Production Engine. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, menjadikan negara Indonesia berpotensi naik kelas menjadi negara maju di tahun 2040,” katanya.

Menggali potensi

Islamic Finance Specialist UNDP, Greget Kalla Buana mengamini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang semakin menggembirakan. Meski demikian, dia mengingatkan masih banyak potensi yang bisa digali guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah.

“Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai USD170 miliar. Namun, kondisi ini belum mampu menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh besar *halal food*,”ungkapnya.

“Benar bahwa ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Namun, persaingan saat ini bukan hanya datang dari negara-negara Muslim, melainkan juga negara-negara nonmuslim, seperti Tiongkok, Thailand, Filipina, Inggris, dan Luksemburg. (Maka) perlu diperhatikan strategi pengembangan ekonomi syariah pada sisi *supply*, bukan sebatas *demand*,” jelasnya.

Terbukti lebih unggul

Greget turut menggarisbawahi sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia. Pertama, adanya sistem kelembagaan yang kuat dalam mendukung ekonomi syariah. “Selain Dewan Syariah Nasional MUI, perkembangan kelembagaan ekonomi syariah juga diperkuat dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang melahirkan Masterplan Ekonomi Syariah,”ungkapnya.

Kedua, adanya hukum dan peraturan yang mengakomodasi inovasi dan kebijakan keuangan syariah di Indonesia. “Sebagai contoh, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (yang) mungkin di negara lain tidak ada,” katanya.

Ketiga, besarnya dorongan masyarakat luas melalui kelompok-kelompok penggerak ekonomi syariah yang mewakili berbagai elemen masyarakat yang memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah. “Sebut saja, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan sebagainya,” rincinya kepada Media Keuangan.

Tumbuh menjanjikan

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia telah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Bank Muamalat menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksinya. Kehadiran Bank Muamalat ini disambut baik oleh penduduk muslim Indonesia, sehingga pada perkembangannya, berjamur beragam lembaga keuangan lainnya.

Kini, tiga dasawarsa sejak awal perkembangannya, Indonesia meyakini mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2024 mendatang. Terkait hal ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, visi Indonesia sebagai pusat ekonomi ekonomi syariah dunia telah tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Agar bisa terwujud, Bambang menuturkan, ada sedikitnya empat target dan indikator utama yang perlu dipenuhi. “Pertama, peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Kedua, peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index. Ketiga, peningkatan kemandirian ekonomi. Dan yang keempat, perbaikan indeks kesejahteraan,” terangnya.

Pencapaian target dan indikator tersebut, kata Bambang, dikawal oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS sendiri dibentuk pemerintah pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Pembentukan KNKS merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Bambang melanjutkan, inisiatif pengembangan ekonomi syariah Indonesia juga telah direalisasikan melalui penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Bambang menyebutkan ada empat bidang utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Bypass Manado merupakan produk pembiayaan syariah

Foto Dok. DJPPR



“(Yaitu) penguatan sektor riil ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan efisiensi keuangan syariah, penguatan penelitian ekonomi syariah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah, serta pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),”jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Greget menyampaikan bahwa ambisi Indonesia untuk menjadi Global Halal Hub bisa dimulai dari prosedur sertifikasi halal yang saat ini telah menjadi acuan dunia. “Terbukti dengan sejumlah negara yang meminta untuk disertifikasi halal oleh MUI atau mengadopsi sertifikasi halal Indonesia,” katanya. Dengan adanya kepercayaan dunia internasional terkait sertifikasi halal, maka Indonesia bisa memainkan peran sebagai *role model* industri halal.

Greget juga menekankan agar ekonomi syariah tidak dipandang sebagai satu industri terpisah, melainkan terhubung dengan ekosistem dan aspek kehidupan

lain secara keseluruhan. Beberapa aspek penting yang dia soroti antara lain nilai-nilai etis, tata kelola dan regulasi, sumber daya manusia (SDM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta teknologi.

Menurut Greget, penerapan ekonomi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Artinya, dampaknya tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga pada spiritual individu, sosial masyarakat, hingga lingkungan. Sementara pada tata kelola dan regulasi, implementasi ekonomi syariah perlu didukung dengan hukum negara dan hukum agama. “Misalnya uang elektronik sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut. Kemudian direspons oleh fatwa MUI tentang uang elektronik syariah,” katanya.

Dari sisi SDM, Greget menegaskan pentingnya pusat pengetahuan dan institusi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Thompson Reuters 2017, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga penyedia kursus keuangan syariah terbanyak setelah

Inggris dan Malaysia. Lebih lanjut, Greget berharap pengenalan ilmu ekonomi syariah sudah mulai dilakukan sejak bangku sekolah. “Sebab kalau mereka tidak dikenalkan dengan ekonomi syariah, bagaimana mereka akan masuk ke jurusan ekonomi syariah dan menjadi penggerak sektor tersebut?” tanyanya.

Selanjutnya, Greget menekankan pentingnya inovasi dan kerja sama antara lembaga ekonomi dan keuangan syariah dengan institusi-institusi pembangunan di lingkup yang lebih luas. Di sisi lain, dia mengapresiasi penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, instrumen pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu mendorong pencapaian SDGs, dalam hal ini proyek-proyek infrastruktur hijau yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, “Bahwa ekonomi syariah bukan sekadar pembangunan ekonomi berlandaskan syariah, tetapi juga mampu memberikan manfaat pada *people, planet*, dan *profit*,” tegasnya.

Terakhir, Greget menyampaikan peluang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi syariah. “Tidak sebatas pada *fintech*, tetapi juga adopsi teknologi *blockchain* untuk pembayaran, mengonfirmasi tingkat kepatuhan syariah, (hingga) melacak rantai kehalalan makanan, kosmetik, atau produk farmasi dari proses manufaktur ke konsumen,” harapnya. Sebagai contoh, belum lama ini UNDP bersama Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf berbasis *blockchain*.

Teks Farida Rosadi

POTENSI EKONOMI SYARIAH

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18%, Indonesia memiliki peluang untuk pengembangan ekonomi syariah. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Hal tersebut didukung dengan tren kenaikan konsumsi barang dan jasa halal yang diperkirakan memiliki pertumbuhan cukup tinggi. Bahkan Indonesia telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Global Muslim Travel Index 2019. Hal ini menunjukkan industri pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah di dalam kehidupan masyarakat.

PERINGKAT INDONESIA PADA INDUSTRI HALAL DUNIA:



8 Islamic Finance Assets
US\$82 Milyar



6 Halal Media and Recreation
Expenditure
US\$10 Milyar



4 Halal Pharmaceuticals
Expenditure
US\$5,2 Milyar



3 Modest Fashion
Expenditure
US\$20 Milyar



5 Halal Travel
Expenditure
US\$10 Milyar



2 Halal Cosmetics
Expenditure
US\$3,9 Milyar



1 Halal Food
Expenditure
US\$170 Milyar

Sumber: State of the Global Islamic Economy (2018)

NILAI-NILAI DAN PRINSIP PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH:

- Kepemilikan;
- Berusaha dengan berkeadilan;
- Kerja sama dalam kebaikan;
- Pertumbuhan yang seimbang.

4 BIDANG UTAMA PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN MASTERPLAN ARSITEKTUR KEUANGAN SYARIAH INDONESIA (MAKSI) DAN MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA (MEKSI):

- Penguatan sektor riil ekonomi syariah, melalui pengembangan industri halal.
- Peningkatan efisiensi keuangan syariah.
- Penguatan penelitian ekonomi syariah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah.
- Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4 (EMPAT) TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR UTAMA YANG AKAN DIKAWAL OLEH KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH (KNKS):

- Peningkatan skala usaha ekonomi syariah;
- Peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index;
- Peningkatan kemandirian ekonomi; dan
- Perbaikan indeks kesejahteraan.

Sumber:

Bank Indonesia

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Dewan Pembina KNKS.

PRINSIP DASAR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH:

- **Instrumen zakat**
Prinsip 1: Pengendalian harta individu
Prinsip 2: Distribusi pendapatan yang inklusif
- **Instrumen pelarangan atas riba**
Prinsip 3: Bertransaksi produktif dan Berbagi Hasil
Instrumen pelarangan atas masyir atau perjudian
Prinsip 4: Transaksi keuangan terkait erat sektor riil
- **Instrumen infaq, shadaqah, dan wakaf**
Prinsip 5: Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
- **Instrumen aturan transaksi muamalah**
Prinsip 6: Bertransaksi atas dasar kerja sama dan keadilan





TUMBUH MEREKAH KEUANGAN SYARIAH

Halal Park yang diresmikan presiden Joko Widodo

Foto
Anas Nur Huda

Seorang wanita berhijab sedang berbenah mengatur tumpukan baju dan aksesoris muslim di butiknya. Beragam mode pakaian muslim modern tampak tersusun rapi baik di dalam maupun di etalasenya.

Ia tak sendiri. Beberapa hijaber lainnya tampak melakukan hal serupa. Memang hari itu beragam toko fesyen muslim dan produk halal lainnya akan diresmikan bersamaan dengan peresmian Kawasan Halal Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Pemerintah sendiri telah menetapkan wisata halal sebagai sektor penggerak pertumbuhan industri halal.

“Hari ini adalah sesuatu yang telah kita

mulai (peresmian) Halal Park sebagai embrio dari pembangunan halal district yang juga akan dibangun di sini,” ungkap Presiden dalam rilis Sekretariat Presiden saat pembukaan Kawasan Halal Indonesia di Jakarta pada 16 April 2019 yang lalu.

Kawasan yang juga disebut sebagai Halal Park tersebut merupakan cikal bakal yang akan terus dikembangkan ke depannya hingga menjadi sebuah kawasan terintegrasi destinasi wisata halal di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan permintaan global terhadap produk-produk halal, termasuk wisata halal, semakin meningkat. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus dapat memanfaatkan peluang tersebut.

“Informasi yang saya terima, proyeksi permintaan produk halal global tahun 2019 mencapai USD3,7 triliun. Padahal tahun 2013 masih sebesar USD2 triliun. Artinya ada pertumbuhan yang sangat besar.

Pertumbuhannya mencapai 9,5 persen,” ujarnya.

Kabar baik lainnya datang sebelum peresmian Halal Park. Pada tanggal 9 April 2019, Global Muslim Travel Index (GMTI) menetapkan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia mengalahkan negara-negara lainnya. Dalam indeks tersebut, peringkat Indonesia meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir diawali dengan peringkat 6 pada 2015, peringkat 4 pada 2016, peringkat 3 pada 2017, peringkat 2 pada 2018, dan tahun ini berada pada posisi teratas. Rencananya, pengembangan Halal Park secara menyeluruh akan dilakukan hingga 2020 mendatang dan menjadi ekosistem baru bagi para pelaku industri halal di Indonesia

Potensi ekonomi syariah

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18 persen dari total populasi, Indonesia memiliki potensi yang besar

dalam ekonomi syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pemerintah juga berupaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah melalui Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) 2016-2018 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang P.S. Brodjonegoro, yang sekaligus selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, beberapa peran pemerintah dalam ekonomi syariah antara lain melalui penerbitan sukuk negara dan instrumen baru lainnya untuk berbagai proyek pemerintah, menawarkan insentif untuk instrumen pembiayaan syariah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional, membentuk bank investasi syariah dalam rangka mengisi kesenjangan pembiayaan dari perbankan syariah dan proyek besar nasional lainnya, konsolidasi dan penguatan perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kemampuan finansialnya dalam menyalurkan pembiayaan, serta melalui penguatan penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dengan membentuk dana APEX baru.

“Berbagai strategi tersebut selanjutnya ditopang oleh roadmap penguatan pembiayaan yang tercantum dalam MEKSI untuk

mencapai target selama kurun waktu 2019 – 2024,” jelas Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa sistem ekonomi syariah pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, *Islamic Economic System* merupakan alternatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif, namun juga berkelanjutan.

“Dunia butuh alternatif (sistem ekonomi). Islam tampil dengan *Islamic Economic System*, dengan *Professional Banking System*, dengan *Insurance Banking Assistance*-nya. Dengan begitu, kita sebagai muslim dan bangsa Indonesia bisa tampil dengan Ekonomi Pancasila-nya,” jelasnya.

Industri keuangan syariah

Di sisi lain, Yani Farida Aryani, Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah Badan Kebijakan Fiskal, menjelaskan bahwa keuangan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia sendiri terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, Sukuk Negara dan saham syariah. Selain itu, masih ada pula sektor keuangan sosial islam (*Islamic social finance*) seperti zakat dan wakaf.

“Zakat dan wakaf yang

notabene masuk ke dalam kelompok dana sosial keagamaan itu masuk ke dalam industri keuangan syariah. Seperti Dana Haji juga kan sebetulnya masih ada di dalam ekosistem keuangan syariah,” jelas Yani.

Lebih lanjut, Yani mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah saat ini masih didominasi oleh perbankan syariah dengan total aset per Januari 2019 mencapai Rp479,17 triliun atau sekitar 5,95 persen dari Rp 8.049 triliun total perbankan nasional. Sedangkan untuk industri keuangan nonbank syariah (IKNB) periode yang sama, asetnya tercatat Rp101,197 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,81 persen dari total aset IKNB nasional yang mencapai Rp1.741 triliun. Dari sisi pembiayaan syariah, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sendiri menyumbang 18 persen dari total obligasi negara yang telah diterbitkan sebesar Rp682 triliun per Maret 2019 lalu.

Senada dengan Yani, Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Lokot Zein Nasution, memaparkan bahwa perkembangan instrumen keuangan syariah paling pesat dialami oleh Sukuk Negara. Sementara itu, instrumen keuangan syariah yang lain tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, komposisi dari perbankan syariah terus mengalami penurunan, meski penurunannya tidak menunjukkan gejala yang konsisten, sehingga sifatnya lebih reaktif terhadap kondisi ekonomi global.

“Dari total aset keuangan syariah, dominasi paling besar dimiliki oleh perbankan syariah, kedua adalah sukuk negara, ketiga adalah pembiayaan syariah, keempat adalah asuransi syariah, kelima adalah IKNB syariah, keenam adalah reksadana syariah, dan terakhir adalah sukuk korporasi,” ujarnya.

Peran APBN

Kementerian Keuangan sendiri memiliki peran mendorong keuangan syariah melalui instrumen APBN. Yang pertama adalah dari sisi penerimaan negara. Menurut Yani, kebijakan perpajakan yang kondusif dan mendukung pengembangan keuangan syariah diperlukan dalam bentuk *tax neutrality* dan insentif perpajakan. *Tax neutrality* menjadi penting karena dalam skema keuangan syariah, seperti Sukuk Negara, diperlukan *underlying asset* dalam bentuk barang, manfaat aset, ataupun dalam bentuk proyek.

“Kalau dalam perpajakan, seolah ada penyerahan barang. Jadi, seolah-olah ada dua kali kena PPN. Kalau di Undang-Undang PPN sepanjang ada pertambahan

nilai dan sepanjang ada penyerahan akan terkena PPN. Kalau kita bilang ini tidak ada penambahan nilai dan tidak ada penyerahan juga. Karena *underlying asset* tadi hanya sebagai dasar perhitungan untuk memberikan pinjaman,” jelas Yani.

Yang kedua adalah dari sisi belanja APBN. Belanja pemerintah di Kementerian/Lembaga tertentu dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan industri atau ekonomi syariah. Misalnya saja *Halal Tourism* melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), kurikulum pendidikan syariah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), optimalisasi peran lembaga wakaf dan zakat melalui Kementerian Agama (Kemenag), *Halal Food* melalui kolaborasi Kemenag, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan), Asuransi Pertanian Syariah melalui Kementan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, serta BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan Syariah.

Terakhir dari sisi pembiayaan. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dwi Irianti Hadiningdyah, memaparkan kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional juga menandai eksistensi serta mengokohkan posisi Indonesia di

pasar keuangan syariah global. Bahkan, pada tahun 2018 Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk yang diterima dengan baik oleh investor dan mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga internasional.

Lebih jauh, Dwi menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong ekonomi syariah secara inklusif, di antaranya melalui diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dengan menerbitkan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Melalui instrumen ini masyarakat umum dapat berinvestasi sekaligus berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Kehadiran Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan menambah portofolio investasi bagi investor, terutama investor syariah. Pada tahun 2019, kedua instrumen tersebut diterbitkan dengan minimum Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Hal tersebut dilakukan agar instrumen tersebut dapat dijangkau dan diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Penerbitan SBSN Ritel dilaksanakan setiap tahun dan sangat diminati oleh masyarakat yang terlihat dari pemesanan yang selalu *oversubscribe* sehingga diharapkan melalui instrumen ini dapat mendorong transformasi masyarakat dari *savings-oriented society* menuju *investment-oriented society*,” pungkasnya.

Teks Abdul Aziz



Laporan Utama

MODAL BESAR MEMIMPIN PASAR

State of the Global Islamic Economy Report 2018 - 2019 menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-10 negara terbesar dalam ekonomi syariah global. Peringkat Indonesia di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait. Penentuan peringkat ini didasarkan pada enam indikator, yakni aset keuangan syariah, makanan halal, pariwisata halal, mode busana halal, media dan hiburan halal, serta obat-obatan dan kosmetik halal. Namun demikian, jika diukur dari jumlah keterlibatan orang dalam sistem ekonomi syariah, Indonesia paling merajai. Dengan modal tersebut, pakar ekonomi syariah Adiwarmar Karim menilai peluang Indonesia memimpin pasar ekonomi syariah global sangat terbuka lebar. “Kalau aset, *they come and go easily*. Tapi orang, *no. They stay*.”

Foto Restian Dwi



"Kalau dari segi aset, memang negara kita masih kecil. Tapi kalau dilihat dari jumlah orang yang terlibat, kita terbesar di dunia."

Adiwarman Karim
Wakil Ketua Badan Pelaksana
Harian Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia

Indonesia punya banyak kelebihan

Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam sistem ekonomi syariah tergolong tinggi. Nasabah bank syariah di Indonesia telah mencapai 40 juta. Jika ditambah dengan asuransi syariah, *multifinance* syariah, pegadaian syariah, dan reksadana syariah, jumlah nasabah bahkan menggapai angka 50 juta. Angka tersebut lebih besar dari total populasi Malaysia, Bahrain, dan Qatar yang berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) berada di atas Indonesia. Lebih lanjut, Adiwarman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan sejumlah kelebihan lain sebagai modal besar Indonesia memimpin pasar.

Pertama, Indonesia memiliki lembaga keuangan terbanyak di dunia, termasuk di dalamnya

ratusan bank pembiayaan rakyat syariah, puluhan bank umum syariah, dan puluhan asuransi syariah. Kedua, terdapat sekitar 45.000 bankir syariah di Indonesia, lagi-lagi terbanyak di dunia. Angka itu belum termasuk jumlah agen asuransi syariah. Ketiga, terdapat sekitar 300 ulama yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Keempat, tercatat lebih dari 150 universitas menawarkan program studi atau mata kuliah ekonomi syariah. Kelima, infrastruktur fatwa di Indonesia sangat independen. Setiap sidang pleno harus dihadiri oleh ulama dari seluruh Indonesia. "Di mana di dunia yang *ente* bisa cari seperti itu? Tidak ada," ujar Adiwarman.

Perbedaan orientasi

Adiwarman mengatakan ada perbedaan orientasi perbankan syariah di negara berpenduduk kecil, sedang, dan besar. Negara Bahrain, Brunei Darusalam, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab masuk ke dalam kelompok negara kecil. Perbankan syariah di sana menjurus kepada *islamic investment banking*. Berbeda halnya dengan negara berpenduduk sedang seperti Malaysia dan Arab Saudi yang memiliki kisaran populasi sekitar 30 juta jiwa, perbankan syariah di negara tersebut merupakan gabungan antara *islamic investment banking* dan *islamic corporate banking*.

Sementara itu, Indonesia, Pakistan, dan Turki yang memiliki populasi di atas 70 juta jiwa masuk ke kelompok negara besar. Di kelompok negara ini, yang dimaksud perbankan syariah adalah *economic retail banking*. "Membandingkan ketiganya dengan menyebut satu istilah yaitu *islamic banking* sudah jelas salah kaprah. Yang namanya *retail banking* itu tidak diukur dengan aset, tetapi dengan berapa banyak orang yang terlibat," terang Adiwarman.

Pendekatan berbeda

Lima tahun berturut-turut, Malaysia berhasil memimpin skor GIEI. Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Yon Machmudi mengungkapkan salah satu faktor keberhasilan Malaysia lantaran negara tersebut merespon lebih awal pengembangan ekonomi syariah dibanding Indonesia. "Awal perkembangan di Indonesia lebih bersifat ideologis. Ada semangat keislaman untuk mengembangkan ekonomi syariah," tutur Yon. Hal senada diungkapkan Adiwarman

Karim yang menyebut fenomena itu sebagai pendekatan *bottom up* atau *people driven*. Hal ini disebabkan munculnya kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan di Malaysia adalah *top down* atau *government driven*. "Pemerintahnya yang membuat besar. Dana pihak ketiga di perbankan syariah Malaysia berasal dari pemerintah dan BUMN-nya," tambah Adiwarman. Adapun di negara Timur Tengah, ia menyebut pendekatan yang dipakai adalah *petrodollar driven*. Banyak konglomerat besar di kawasan Timur Tengah yang memiliki dana besar. Sebagian diantaranya juga berinvestasi di London, Luksemburg, dan Malaysia.

Beri ruang lebih besar

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Yon Machmudi berpendapat pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar. "Walaupun secara regulasi sudah diatur, dukungan secara kuat perlu dilakukan," ujar Yon. Menurutnya, sektor industri pariwisata dan infrastruktur perlu digarap lebih intensif. Selain itu, ia berharap pemerintah dan BUMN dapat mengalokasikan dananya ke sektor perbankan syariah. Melalui penguatan ini, perbankan syariah dapat memperluas ekspansinya ke sektor industri yang lebih banyak bergerak di sektor riil, seperti pertanian dan perkebunan.

Teks Reni Saptati D.I.



AGAR EKONOMI SYARIAH KIAN MEREKAH

Minat dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup yang sesuai dengan syariat kian tinggi. Industri halal juga semakin digemari. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia? Simak wawancara Media Keuangan bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Komite Keuangan Syariah Nasional (KNKS), Bambang Brodjonegoro berikut.

Bagaimana potensi ekonomi syariah Indonesia ke depan?

Peluang untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Terlebih lagi, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk produk dan jasa berbasis ekonomi dan keuangan

syariah. Namun, pemenuhan kebutuhan permintaan pasar ini masih belum optimal.

Berdasarkan laporan terakhir dari Global Islamic Economy Report 2018-2019, Indonesia termasuk 10 negara dengan konsumen terbesar untuk beberapa sektor industri halal, yaitu industri makanan halal, pariwisata halal, *fashion* muslim, media, dan farmasi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk menggunakan produk halal juga cukup tinggi. Akan tetapi, Indonesia baru menempati posisi 10 besar sebagai produsen maupun penyedia pada sektor industri pariwisata, halal, dan *fashion* muslim. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang sesuai syariah di Indonesia berasal dari kegiatan impor, yang mana berpengaruh negatif terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia.

Padaahal konsumsi yang berkaitan dengan industri halal mencapai lebih dari USD200 miliar atau lebih

dari 36 persen dari total konsumsi rumah tangga, atau setara 20 persen dari total PDB Indonesia. Maka, pengembangan industri halal domestik memegang peranan penting dalam menekan defisit neraca perdagangan dengan membesarkan produksi pada industri halal, serta memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya, dan perekonomian Indonesia secara agregat.

Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia?

Inisiatif pengembangan ekonomi syariah Indonesia telah direalisasikan melalui penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan empat bidang utama pengembangan ekonomi syariah. Pertama, penguatan sektor riil ekonomi syariah, melalui pengembangan industri halal. Kedua, peningkatan efisiensi keuangan syariah. Ketiga, penguatan penelitian ekonomi syariah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah. Keempat, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lebih lanjut, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal mulai Oktober 2019. Amanat ini bisa dijalankan asalkan ada komitmen kuat dari berbagai pihak, terdapat program konkret yang mudah diimplementasikan, ada sinergi antarlembaga dan pihak terkait, serta edukasi yang intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal. Hal yang juga penting adalah memperhatikan profil konsumen secara jangka panjang.

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), bagaimana peran KNKS dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah Indonesia?

KNKS tidak hanya difokuskan untuk mengakselerasi perkembangan dalam keuangan syariah saja, tetapi juga diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Keuangan syariah tidak akan berjalan kuat dan tumbuh tinggi, tanpa disokong oleh pengembangan ekonomi syariah. Berkaitan dengan hal ini, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia telah dirumuskan visi ekonomi syariah yang berusaha untuk dijalankan KNKS, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, makmur, dan madani.

Perumusan visi tersebut didasari keinginan untuk menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian nasional. Ada empat target capaian dan indikator utama yang akan dikawal oleh KNKS. Pertama, peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Kedua, peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index. Ketiga, peningkatan kemandirian ekonomi. Keempat, perbaikan indeks kesejahteraan. Berbagai upaya ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Sektor mana saja yang bisa dikembangkan guna mempercepat laju ekonomi syariah di Indonesia?

Pada dasarnya pengembangan ekonomi syariah Indonesia tidak selalu berpusat pada industri keuangan dan perbankan. Sektor keuangan dan perbankan syariah membutuhkan pertumbuhan sektor riil yang signifikan untuk dapat berkembang beriringan. Sejalan dengan hal tersebut, KNKS turut memfokuskan program-program kerja ke depan pada beberapa sektor kunci ekonomi syariah dan industri halal, antara lain perdagangan dan *supply chain* halal, *e-commerce* dan *digital payment* syariah, standardisasi dan sertifikasi halal, serta *lifestyle* dan industri halal. Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong sektor pembiayaan yang menggunakan prinsip keuangan syariah?

Berdasarkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), terdapat beberapa peran pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan Syariah. Pertama, penerbitan sukuk negara dan instrumen baru lain untuk berbagai proyek pemerintah. Kedua, menawarkan insentif untuk instrumen pembiayaan syariah guna mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional, terutama bila diterbitkan dalam bentuk sukuk *fund* baru. Ketiga, membentuk bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan pembiayaan dari perbankan syariah dan proyek besar nasional lainnya. Keempat, konsolidasi dan penguatan perbankan Syariah untuk dapat meningkatkan kemampuan finansialnya dalam menyalurkan pembiayaan. Kelima, melalui penguatan penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dengan membentuk dana APEX baru.

Strategi tersebut ditopang oleh *roadmap* penguatan pembiayaan yang tercantum dalam MEKSI 2019–2024. Beberapa strateginya yaitu memberikan stimulus kepada BUMN/BUMD untuk meningkatkan jumlah pembiayaan syariahnya melalui bank syariah. Selanjutnya, menambah jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terdaftar menjadi Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat Syariah. Termasuk juga, meningkatkan jumlah pembiayaan syariah produktif pada sektor korporasi dan pembiayaan jangka panjang (infrastruktur).

Teks Farida Rosadi

Trivia

Tahukah kamu?



Kementerian Keuangan memiliki instrumen pembiayaan **Sukuk Negara atau SBSN** yang dikeluarkan sejak tahun 2008. Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008, debut penerbitan Sukuk Negara pertama dilakukan.

Sejak tahun 2013, Sukuk Negara digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara **earmarked** yaitu secara langsung membiayai proyek-proyek Kementerian/Lembaga tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN.

Sukuk Negara memiliki berbagai macam jenis, salah satunya Sukuk Tabungan. Saat ini, masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi di **Sukuk Tabungan** hanya dengan minimum pembelian sebesar Rp1 juta dengan jangka waktu (tenor) investasi selama 2 tahun.

Foto Dok. DJPPR

Kisah Pendidikan di Pedalaman

Bermula dari hutan belantara di Taman Nasional Bukit Duabelas - Jambi, enam belas tahun lalu Sokola Rimba mengawali perjalanannya menyediakan pendidikan bagi masyarakat adat Indonesia. Kurikulum dan metode yang diterapkan disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat setempat. Tujuannya, supaya mereka dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dan mampu menjawab tantangan modernisasi yang mengancam eksistensi.



Kegiatan belajar di Sokola Rimba

Foto
Dok. Sokola Rimba

Kini keberadaan Sokola Rimba sudah merambah masyarakat adat di daerah lainnya, antara lain Sokola Kajang di Sulawesi Selatan, Sokola Asmat di Papua, Sokola Kaki Gunung di Jawa Timur, dan sejumlah tempat lain di penjuru Indonesia. Media Keuangan mendapat kesempatan untuk berbincang dengan salah satu pendiri Sokola Rimba, Aditya Dipta Anindita. Perempuan yang biasa disapa Indit ini menceritakan perjalanan Sokola Rimba dalam mengupayakan keadilan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Apa yang menggerakkan para pendiri Sokola Rimba untuk terjun langsung dalam pendidikan untuk masyarakat adat di pedalaman?

Pada awalnya, kami bergerak dalam project konservasi hutan. Ketika di lapangan, kami menyadari bahwa yang penting bukan saja tentang alamnya, tetapi juga masyarakat adat yang tinggal di sana. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga hutan. Kemudian, kami berpandangan masyarakat adat harus tetap survive. Kami memutuskan untuk

membantu mereka melalui pemberian pengetahuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, mereka bisa mempertahankan hutan. Mereka juga dapat menentukan pilihan dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi. Jadi, kami sepakat untuk membuat program pendidikan untuk orang Rimba. Itulah awal lahirnya Sokola Rimba.

Bagaimana proses penyusunan kurikulum pendidikan untuk masyarakat adat?

Kurikulum Sokola Rimba disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan aktual di tempat komunitas adat itu sendiri. Proses pembuatan kurikulum dilakukan bersama-sama dengan komunitas melalui pengamatan dan diskusi bersama. Bentuk diskusi bisa berupa FGD (*Focus Group Discussion*) atau obrolan sehari-hari, baik dengan pemimpin adatnya maupun warga biasa. Kami berupaya menggali persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Guru-guru Sokola Rimba tinggal di komunitas, *sleep in*, sehingga setiap hari kami dapat mengikuti ritme harian komunitas, serta berusaha mendengar dan melihat persoalannya lebih dekat. Kemudian, kami merumuskan hal-hal apa yang menjadi persoalan dari sudut pandang masyarakat adat. Nah, tema-tema persoalan tersebut kemudian kita *breakdown* menjadi satu tema pembelajaran di program pendidikan Sokola Rimba.

Bagaimana metode pengajaran yang diberikan kepada masyarakat adat?

Kami menggunakan pendekatan khusus. Semuanya diawali dengan riset untuk memahami komunitas dan mengetahui berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari situ, kami beradaptasi dengan budaya mereka, mengikuti cara hidup mereka, sehingga sekolah pun mengikuti ritme harian mereka. Metode pengajaran yang terbentuk merupakan hasil berinteraksi dengan komunitas. Kami mengajar pada waktu-waktu luang ketika mereka tidak ada kegiatan khusus.

Sekolah tidak terbatas pada ruang kelas. Tidak ada kelas satu sampai enam SD. Tidak ada kewajiban masuk jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Hal ini lantaran mereka sudah memiliki rutinitas harian yang berbeda dengan kita. Tiap pagi anak laki-laki bertugas untuk mengikuti ayahnya melihat jerat yang dipasang semalaman. Jika dia tidak ikut, binatang tangkapan akan membusuk. Contoh lain, ada waktu-waktu tertentu mereka harus bekerja di kebun. Proses membuka ladang sampai menanam harus intensif dan mengharuskan mereka tinggal di pondok sementara dekat ladang. Sekolah pun mengikuti mereka berpindah ke rumah ladang.

Apa yang menjadi fokus utama pengajaran?

Pertama, baca tulis hitung sebagai literasi dasar. Untuk taraf selanjutnya, kami menyebutnya literasi terapan. Secara umum ada dua hal dalam literasi terapan ini, yaitu pengetahuan tentang dunia luar dan penguatan identitas adat. Kami memberikan





"Kami menggunakan pendekatan khusus. Semuanya diawali dengan riset untuk memahami komunitas dan mengetahui berbagai persoalan yang mereka hadapi. "

Aditya Dipta Anindita,
salah satu pendiri Sokola Rimba

pengetahuan tentang dunia luar yang mereka butuhkan. Misalnya tentang pengurusan lahan, kami pelajari terlebih dulu hukum-hukum tentang itu. Atau sewaktu mereka harus beralih mata pencaharian ke pertanian, kami pelajari ilmu tentang pertanian. Terkait kegiatan berdagang, kami juga pelajari tentang uang dan pasar.

Fokus pengajaran literasi terapan lainnya adalah penguatan identitas adat. Kami memperkuat apa yang sudah mereka punya, jangan sampai mereka belajar ilmu luar tetapi pada akhirnya tidak bangga dengan diri mereka sendiri. Justru masyarakat adat mempunyai pengetahuan yang orang luar tidak pernah mempelajarinya di bangku sekolah formal. Pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang lestari, misalnya. Tanpa adanya hukum, masyarakat adat sudah memiliki kesadaran penuh untuk menjaga alam. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu jika tidak didukung bisa punah, padahal mereka bisa berperan menjadi penjaga hutan Indonesia.

Setelah literasi dasar dan literasi terapan, kita masuk ke tahap ketiga

yang disebut pendidikan advokasi dan pengorganisasian komunitas. Dalam tahap ini, kami memberikan pelajaran tentang bagaimana mengorganisasi diri dan cara mengakses fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Kami memberi informasi bahwa mereka punya hak untuk mendapat layanan kesehatan secara gratis dan mengakses bantuan-bantuan lainnya dari negara.

Bagaimana proses perekrutan para relawan guru Sokola Rimba?

Jika sedang membutuhkan guru, kami umumkan di media sosial atau *whatsapp*. Proses seleksi pertama melalui *website*. Mereka mengisi formulir, kami baca jawaban yang mereka *input*, kemudian kami panggil yang memenuhi beberapa kriteria untuk diseleksi lagi. Sejauh ini peminatnya cukup banyak. Sekalipun kita tidak membuat pengumuman, selalu ada yang mengisi aplikasi relawan melalui *website*.

Perekrutan relawan guru dikelola di kantor administrasi Jakarta, tetapi gurunya sendiri berasal dari banyak tempat di Indonesia, ada dari Jawa, Sulawesi, juga Nusa Tenggara Timur. Di masing-masing lokasi program, selain guru-guru, kita juga mempunyai kader-kader, yaitu orang lokal yang dulunya adalah murid, lalu kami buat program lanjutan supaya bisa membantu kami mengajar atau menjadi mediator bagi komunitas untuk menghadapi persoalan-persoalan dari luar.

Sejauh ini, apa saja tantangannya yang dihadapi Sokola Rimba?

Tantangan yang paling terasa dalam menjalankan program ini adalah pencarian dana. Kebutuhan dana untuk kegiatan operasional tidaklah kecil. Bukan sekedar buku atau pena, melainkan juga kebutuhan logistik, transportasi ke daerah-daerah yang jauh, dan pemberian asuransi kesehatan untuk guru-guru yang tinggal. Dana menjadi tantangan terbesar kami.

Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah setempat dan pemerintah pusat?

Kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan massal karena di rimba sangat sering terjadi wabah penyakit. Kami juga bekerja sama dengan Balai Taman Nasional untuk pengelolaan hutan bersama. Adapun dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami lakukan sekarang adalah memberi mereka masukan supaya dapat menyelenggarakan sekolah khusus untuk masyarakat adat. Undang-Undangnya sudah ada, tetapi pedoman pelaksanaannya belum ada. Kami sedang mengupayakan itu.

Apa harapan Anda terhadap pendidikan di Indonesia?

Ada banyak pengetahuan lokal masyarakat adat yang seharusnya bisa dikembangkan lewat jalur pendidikan. Namun, hal tersebut menjadi tidak bisa lantaran masih muncul kekhawatiran di masyarakat adat, mereka akan lupa dengan pengetahuan adatnya jika mengikuti pendidikan formal.

Para orang tua di masyarakat adat menyebut sekolah formal sebagai "sekolah pergi". Menurut mereka, jika mengikuti sekolah formal, anak mereka sering tidak kembali lagi dan lupa dengan adatnya. Setelah bersekolah, anak-anak mereka justru mencari kerja di kota. Tidak ada yang menjaga kampung, tidak ada yang melestarikan adat. Itulah bentuk kekhawatiran masyarakat adat.

Kami melihat saat ini kurikulum sekolah formal belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dan kekhususan budaya mereka. Kami berharap masyarakat adat bisa mendapatkan pendidikan khusus yang bisa mengakomodir kebudayaan mereka dan diakui oleh negara.

Teks Reni Saptati D.I

BERANI LAPOR WISE



 pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

 Whatsapp/SMS 0815 99 6666 2

 Fax (021) 3523252

 Telepon (021)3454236

 <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

Sehati dengan Akuntansi

Firmansyah N. Nazaroedin

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Foto
Anas Nur Huda

Fajar masih belum tampak. Semilir udara dingin di pagi hari itu cukup membuat mata sebagian besar orang terlelap. Namun berbeda bagi seorang pemuda. Ia sudah terbiasa bangun jam empat subuh setiap harinya. Kebiasaan tersebut ia tiru dari kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya mengajarkan untuk tidak tidur kembali setelah sholat tahajud hingga sholat subuh dan pagi menjelang. Tujuannya jelas, selain untuk beribadah, orang tuanya ingin mengajarkan kedisiplinan serta tanggung jawab kepada dirinya. Alhasil, sosok pemuda itu kini telah berhasil menjadi salah satu tulang punggung reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah. Ialah Firmansyah N. Nazaroedin yang kini dipercaya menjadi Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb Kemenkeu).

Prestasi Firmansyah tak tanggung-tanggung. Berkat kompetensi dan dedikasinya, ia ditunjuk menjadi perwakilan Indonesia di Consultative Advisory Group (CAG) International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) bersama dua puluh satu perwakilan negara lainnya dari seluruh dunia. Penunjukan ini telah berlangsung untuk dua periode keanggotaan, pertama dari tahun 2016 hingga 2018 dan dipilih kembali untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Dalam CAG IPSASB, ia tidak hanya bekerja untuk mengembangkan standar akuntansi sektor publik internasional, namun juga berbagi pengalaman dalam mengembangkan standar dan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Reformasi Sistem Akuntansi

Hampir sepanjang kariernya di Kemenkeu, Firmansyah selalu bersentuhan dengan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Selepas lulus dari jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1991, ia ditempatkan di Pusat Pembukuan Keuangan

Negara Departemen Keuangan. Pada saat itu, Pemerintah belum memiliki sistem akuntansi yang modern. Bersama dengan tim dari World Bank, ia terlibat dalam penyusunan rancangan sistem akuntansi instansi (SAI) melalui proyek *Government Accounting System* (GAS).

“Pada saat itu uji coba implementasi SAI diputuskan dilakukan secara bertahap untuk sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L). Beberapa pegawai senior ingin implementasi dilakukan terhadap K/L yang mudah terlebih dahulu. Sementara saya terbalik. Layaknya pegawai *fresh graduate*, saya mempunyai idealisme tinggi. Saya ingin implementasi dilaksanakan kepada K/L yang sulit terlebih dahulu, dengan pertimbangan bila yang sulit dapat kita lalui, maka pengembangan sistem berikutnya akan lebih mudah. Alhamdulillah, ide ini berhasil diyakini dan diterima,” cerita Firmansyah.

Tak lama berselang, Firmansyah berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Master of Science in Information Management, School of Engineering and Applied Science, The George Washington University, Washington DC, USA. Ia pun sukses lulus pada tahun 1994 dan kembali berkarya di Kementerian Keuangan. Beberapa tahun kemudian, pada awal tahun 2011, Firmansyah dipercaya menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dan setelah itu ditugaskan sebagai Inspektur VI di Inspektorat Jenderal Kemenkeu pada tahun 2012. Saat menjabat Inspektur VI, salah satu tugasnya adalah ikut mengawal proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang sampai saat itu belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan berbagai upaya, Firmansyah mencoba menyinergikan semua unit eselon I pada Kemenkeu agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persamaan persepsi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Meski banyak tantangan, namun berkat perjuangan dan kerja sama yang baik dengan semua unit terutama Biro Perencanaan Keuangan

Sekjen, Kemenkeu berhasil memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2011.

Tantangan berikutnya ketika ia mendapat amanah sebagai Direktur APK di tahun 2015, di mana saat itu terjadi transisi basis akuntansi pemerintah yang semula *Cash Towards Accrual* menjadi basis akrual penuh. Sebagian besar pihak khawatir terjadi penurunan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang pada tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini *Disclaimer*.

“Saya kira wajar mereka berfikir seperti itu karena memang tidak semua negara berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan pada saat transisi basis akuntansi. Namun hal ini justru menjadi tantangan yang harus dihadapi. Alhamdulillah dengan izin Allah, langkah-langkah strategis yang kami lakukan waktu itu membuahkan hasil, opini LKPP di tahun tersebut tetap mendapat predikat WDP,” kenang Firmansyah.

Selanjutnya opini LKPP dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) meningkat menjadi WTP dalam dua tahun terakhir, yaitu untuk tahun 2016 dan 2017. Seiring peningkatan kualitas laporan keuangan, tujuan berikutnya adalah menjadikan laporan keuangan Pemerintah sebagai salah satu data dukung dalam pengambilan kebijakan ekonomi Pemerintah. Untuk itu, arah pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di masa mendatang antara lain pengembangan standar akuntansi pemerintahan sesuai *best practices* di dunia internasional, konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, pengembangan lebih lanjut atas *Government Finance Statistics*, serta peningkatan kemanfaatan informasi laporan keuangan Pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang baik, sangat dibutuhkan sebagai *feedback* dalam membantu pemerintah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran pada masa yang akan datang.

“Tentu saja dengan terobosan yang kita



Direktur APK, Firmansyah, dan keluarga sedang bermain ski di Yuzawa Resort, Tokyo

Firmansyah dalam pertemuan tahunan IPSASB CAG di Kuala Lumpur pada Desember 2018

Foto Dok. Pribadi

merupakan sosok yang sabar dan penyayang. Sampai dengan kelas tiga Sekolah Menengah Atas, Firmansyah selalu diantar jemput ke sekolah oleh kedua orang tuanya. “Kalau saya les hingga malam, saya *ditungguin* oleh Ibu atau Ayah. Padahal saya bisa naik bus atau menyetir mobil sendiri, tapi tidak diperbolehkan. Itulah contoh kasih sayang orang tua. Mereka rela berkorban,” jelasnya.

Worklife Balance

Saat disinggung hubungan antara pekerjaan dan rumah tangga, Firmansyah mengungkapkan bahwa ia termasuk orang yang percaya dengan konsep *worklife balance*. Oleh karena itu, manajemen waktu menjadi sangat penting baginya. Menurutnya, kalau ia punya waktu untuk fokus bekerja berarti ia juga harus menyediakan waktu untuk *me time*, seperti olahraga dan membaca, serta *quality time* bersama keluarga seperti jalan-jalan di hari libur atau setidaknya bercanda dengan anak-anak di sela-sela kesibukan. Pun demikian, sang istri Isfandria Shintasari, dan kedua anaknya, Hanif Nurindra Nazaroedin dan Aliyya Khairunisa Firmansyah, maklum dengan pola pekerjaan dirinya. Keluarga selalu memberikan dukungan positif kepada dirinya.

Harapan

Bagi Firmansyah, Kementerian Keuangan merupakan salah satu institusi terbaik dari segi pegawai, fasilitas, maupun proses bisnis. Ke depan, menurutnya, yang perlu dimitigasi dan dipersiapkan adalah tantangan berkembangnya era digital atau revolusi industri 4.0. Oleh sebab itu, dalam beberapa kesempatan rapat pimpinan, ia tidak hanya mempresentasikan tugas dan fungsi direktoratnya, namun juga membahas bagaimana visi direktoratnya hingga tahun 2025.

“Mau dibuat seperti apa nih APK sampai tahun 2025. Jadi saya berbicara terkait *Artificial Intelligence*, mengenai *Decision Support System*, dan *Management Information System*. Tidak melulu laporan keuangan saja. Jadi, *impact* dari laporan keuangan itu mau seperti apa. Harapannya, ke depan akan segera dibangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang mengintegrasikan seluruh data keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, hingga BUMD. Dan selanjutnya data yang besar ini dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

Sementara itu, harapan pribadinya adalah dapat selalu belajar dari setiap hal yang terjadi, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, dan semaksimal mungkin membantu orang lain. “Seperti dalam pekerjaan, perkembangan teknologi yang saat ini terjadi menyebabkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus berbasis IT, saya pun harus siap dengan perubahan tersebut dan mau belajar dari siapapun. Bagi saya, satu hal yang tidak akan mungkin pernah berulang adalah waktu. Jadi setiap yang saya lakukan, saya selalu berusaha untuk bisa berguna bagi siapapun, baik itu diri saya sendiri, keluarga, maupun lingkungan kerja saya,” pungkasnya menutup wawancara.

Teks Abdul Aziz

Opini

Berimbang Pahami Utang Negara

Nana Riana,
Aparatur Sipil Negara, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Utang negara menjadi topik yang selalu hangat dibahas. Sebagian besar kritik cenderung melakukan *exaggeration* terhadap besarnya nominal utang negara dan sedikit sekali yang melakukan *review* secara berimbang. Opini berimbang tentunya tidak hanya melihat besarnya nilai utang secara nominal, tetapi juga mengungkapkan fakta-fakta yang menjadi alasan adanya utang negara, bagaimana prudensi pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah, apa saja yang sudah dicapai pemerintah melalui pengelolaan portofolio utangnya, termasuk juga fakta-fakta ekonomi yang bisa di-*generate* oleh utang negara.

Tidak bisa dipungkiri, kepentingan utama pemerintah untuk melakukan utang saat ini adalah untuk pembiayaan defisit APBN. Postur APBN kita hingga saat ini masih defisit. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk melakukan efisiensi pengeluaran negara dan optimalisasi penerimaan negara. Meski demikian, hingga saat ini total belanja pemerintah belum bisa ditutupi oleh penerimaan, sehingga menimbulkan defisit pembiayaan anggaran.

Agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan, pemerintah membiayai defisit anggaran melalui utang. Jadi, utang negara adalah alat (*tools*) yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan pembangunan dan fungsi-fungsi penting lain yang mendesak dan strategis secara lebih cepat (tanpa penundaan). Keputusan untuk melakukan utang bukan semata-mata berasal dari pemerintah, melainkan bagian dari APBN yang dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, kesepakatan tersebut disahkan sebagai Undang-Undang (UU) APBN setiap tahunnya. Dengan demikian, kebijakan utang yang dilakukan oleh pemerintah sudah diamanatkan dalam UU APBN.

Utang menurut ekonom

Landasan teoritis terhadap utang negara telah banyak dibahas dalam literatur. Para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan JS Mill, memang lebih

mengutamakan sumber pembiayaan defisit dari pajak dibandingkan dari utang. Mereka menganggap utang hanya akan memperlambat perkembangan kesejahteraan suatu bangsa secara alami. Sebab, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, dialihkan oleh negara untuk kegiatan yang tidak produktif (Nicholson, 1920).

Namun demikian, teori ekonomi klasik tentang utang negara ini dibantah oleh teori ekonomi modern. Hal ini terutama setelah terjadinya *the Great Depression* tahun 1930. Asumsi dasar yang digunakan oleh teori ekonomi klasik terkait pemanfaatan tenaga kerja penuh (*full employment*) dan asumsi pengeluaran pemerintah yang tidak produktif (*unproductiveness of public expenditure*) dibantah oleh ahli teori ekonomi modern yang dipelopori JM Keynes.

Keynes (1930) menyatakan bahwa utang yang dilakukan oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai perekonomian. Hal ini selanjutnya dapat



Ilustrasi Dimach Putra

Melihat rasio utang negara kita yang berkisar 29 persen dari GDP, maka bisa dikatakan utang negara kita masih dalam kategori aman dan terjaga.

menyerap tenaga kerja dan meningkatkan *output*, sehingga pendapatan nasional meningkat. Dalam kondisi perekonomian melambat, stimulus fiskal melalui utang dapat juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ini selanjutnya mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan, sehingga kemampuan untuk membayar kembali utang ikut meningkat.

Bagaimana dengan prudensi pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah? Para ahli ekonomi modern sepakat, meskipun utang negara dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional, penggunaan instrumen fiskal tetap memerlukan kehati-hatian dan perhatian dari pemerintah (Svaljek, 1997). Oleh karena itu, utang negara harus diikuti dengan pengelolaan yang *prudent*. Hal ini guna menjamin adanya *debt sustainability*. Secara sederhana, *debt sustainability* diartikan sebagai kemampuan negara untuk menjaga rasio utang terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) tetap konstan selama periode waktu tertentu (Svaljek, 1997). Di sisi lain, Pigou (1929) menyatakan bahwa *debt sustainability* akan tercapai apabila pertumbuhan pendapatan melampaui imbal hasil utang pemerintah.

Sementara Bummerhof (1996) memberi ukuran lain *debt sustainability*. Ukuran tersebut yaitu rasio biaya utang terhadap pajak, rasio biaya utang terhadap belanja negara, dan rasio biaya utang *Gross Domestik Bruto* (GDP). Selain itu, ukuran *debt sustainability* adalah rasio utang baru terhadap belanja negara, rasio defisit terhadap GDP, serta rasio total utang terhadap GDP. Dua rasio terakhir merupakan rasio terpenting dan digunakan sebagai syarat masuk keanggotaan EMU atau The European Monetary Union (Brummerhoff, 1996).

Dua rasio terakhir tadi juga dijadikan acuan prudensi dalam pengelolaan utang negara kita. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) secara jelas mengatur bahwa defisit dibatasi maksimal 3 persen. Sementara total utang maksimal 60 persen dari GDP. Berdasarkan data IMF, rasio defisit APBN kita mengalami tren penurunan dari 2,60 persen pada 2015 menjadi 2,22 persen pada 2018. Bahkan, data realisasi APBN 2018 menunjukkan defisit mencapai 1,8 persen. Demikian juga APBN 2019 mengasumsikan defisit di kisaran 1,8 persen. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk terus melakukan efisiensi belanja negara sambil terus melakukan optimalisasi sektor penerimaan. Begitupun dengan rasio utang terhadap GDP, masih berada di kisaran 29 persen atau jauh dari batas maksimal 60 persen.

Kapan rasio utang dianggap rawan?

Reinhart dan Rogoff (2010) pernah melakukan observasi tahunan sebanyak lebih dari 3700 kali terhadap data 44 negara

dengan interval waktu 200 tahun. Mereka menyimpulkan bahwa apabila rasio utang *gross* mencapai 60 persen GDP, maka pertumbuhan tahunan menurun sebesar 2 persen. Sementara bila melampaui 90 persen GDP, maka pertumbuhan akan drop setengah kali angka semula. Melihat rasio utang negara kita yang berkisar 29 persen dari GDP, maka bisa dikatakan utang negara kita masih dalam kategori aman dan terjaga (*sustainable*). Begitupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, rasio utang negara kita tergolong aman.

Data IMF per Oktober 2017 menunjukkan rasio utang Indonesia berkisar 28 persen, utang per kapita USD1.004 dengan GDP per kapita sebesar USD3.604. Jika dibandingkan dengan Jepang, misalnya, rasio utangnya adalah 239 persen dengan utang per kapitanya hampir 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan GDP per kapitanya (USD93.095 vs USD38.917). Begitupun Malaysia dengan rasio utang 56 persen dan utang per kapitanya USD5.272, sedangkan Thailand memiliki rasio utang 42 persen dengan utang per kapita USD2.460.

Kelola utang dengan tanggung jawab

Kerja keras pemerintah dalam mengelola utang agar tetap berada dalam kerangka *debt sustainability* telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan internasional. Contohnya, Indonesia mendapatkan *rating* sebagai negara dengan kategori *investment grade* dari lembaga-lembaga *rating* dunia, yaitu Fitch, Japan Credit rating Agency, R&I, Moody's, dan S&P.

Untuk memperoleh peringkat *investment grade* bukanlah hal mudah. Ada beberapa proses *assessment* perlu dipenuhi. Proses tersebut antara lain kondisi ekonomi dan pertumbuhan, tingkat risiko, kinerja fiskal dan rasio utang, kinerja moneter, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, apa saja yang telah

dicapai Indonesia dengan jumlah utang negara yang besar? Salah satunya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan IMF berada di kisaran 5,1 persen selama 2018-2019. Padahal untuk pertumbuhan dunia, IMF menurunkan proyeksinya pada Oktober 2018 menjadi 3,7 persen dari sebelumnya 3,8 persen pada April 2018. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi dunia melambat, Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Artinya, utang pemerintah yang digunakan untuk menutup defisit

APBN masih sanggup mendorong roda pertumbuhan ekonomi. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dijelaskan terkait dampak positif yang dicapai melalui utang yang dilakukan oleh negara, seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, jaminan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Maka,

mari kita melihat utang negara dari sudut pandang berimbang. Hal ini bukan berarti menegasikan risiko terkait utang negara. Betul bahwa utang negara akan memberikan tekanan pada kondisi fiskal negara dan meningkatkan *country risk exposure*. Itulah sebabnya, utang negara harus dikelola secara *prudent* atau hati-hati. Rasio defisit dan rasio utang terhadap GDP yang masih di bawah *threshold*

maksimum, serta peningkatan *rating* Indonesia menjadi *investment grade* oleh lembaga-lembaga *rating*



Ilustrasi Dimach Putra

Memaknai Sistem Perlindungan Sosial

Ahmad Irsan A. Moeis,
Analisis Senior pada Direktorat Jenderal Anggaran

Sistem perlindungan sosial merupakan isu pembangunan yang mulai banyak dibahas sejak era 1990-an, terutama di negara-negara berkembang. Namun, terdapat perbedaan pemahaman terhadap sistem perlindungan sosial itu sendiri, baik di kalangan akademik maupun perumus kebijakan. Secara umum, sering terjadi kebingungan

memaknai antara jaring pengaman sosial (*social safety nets*), jaminan sosial (*social security*), perlindungan sosial (*social protection*), asuransi sosial (*social insurance*) dan bantuan sosial (*social assistance*).

Bank Dunia sebagai lembaga besar yang sering menjadi rujukan beberapa kali merubah makna “jaring pengaman sosial”. Awalnya, Bank Dunia (1990) membedakan antara *safety nets* dan *income or cash transfers*. *Safety nets* diartikan sebagai program membantu individu yang secara temporer mengalami *economics shock* seperti diberhentikan dari pekerjaan. Sementara itu, *income transfers* lebih dimaknai sebagai bantuan bagi individu yang secara permanen tidak dapat bekerja seperti para lansia dan kelompok disabilitas. Namun, pembedaan tersebut dihapuskan pada Tahun 1992 (Reddy, 1998).

Tahun 1996, Bank Dunia memperluas makna tersebut menjadi seluruh program kesejahteraan berbasis keluarga, program *social security*, dan intervensi pengentasan kemiskinan. Reddy juga mencatat bahwa dalam dokumen Bank Dunia dan UNCTAD, program-program aksi sosial, *social investment funds* dan *emergency social funds* masuk dalam kategori jaring pengaman sosial. Bahkan, krisis yang melanda kawasan Asia telah mendorong Bank Dunia kembali merevisi makna dari jaring pengaman sosial, meliputi program yang menjamin pendapatan minimum individu atau rumah tangga dalam menghadapi berbagai peristiwa sosial-ekonomi.

Dari sisi pelaksanaannya, sistem perlindungan sosial dapat dilihat secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, perlindungan sosial dilihat terbatas pada program-program bantuan sosial saja. Secara luas, perlindungan sosial meliputi kebijakan dan program yang didesain untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan jatuh miskin melalui peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja,

menurunkan risiko yang harus dihadapi, dan meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola risiko sosial-ekonomi seperti pengangguran, penyakit, disabilitas dan lansia (Handayani, 2010). Untuk itu, perlindungan sosial mencakup pensiun, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan sosial.

Transformasi Sistem Perlindungan Sosial

Bank Dunia menyatakan awalnya perlindungan sosial dimaknai secara sempit dan kemudian berkembang membahas intervensi pasar tenaga kerja (termasuk tenaga kerja anak-anak), jaminan sosial (termasuk pensiun) dan jaring pengaman sosial (termasuk dana sosial). Oleh karena itu, terdapat empat aspek yang harus dipenuhi oleh sistem perlindungan sosial.

Pertama, perlindungan sosial harus diletakkan sebagai katalisator pengentasan kemiskinan dengan peningkatan kapasitas orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dipandang terbatas pada jaring pengaman saja. Kedua, perlindungan sosial harus didekati sebagai program investasi daripada biaya. Begitu orang miskin berhasil dientaskan, maka mereka akan menjadi aset bagi perekonomian. Ketiga, perlindungan sosial diarahkan sebagai solusi bagi akar permasalahan kemiskinan, bukan sekedar program jalan pintas yang hanya mengatasi gejalanya saja. Keempat, harus dipahami bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan memberi uang kepada orang miskin.

Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia

Dalam sistem keuangan negara, istilah perlindungan sosial pertama sekali muncul dalam Nota Keuangan (NK) TA 1999/2000 sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997/1998. Pada masa krisis ini, sistem perlindungan sosial masih fokus pada program *social assistance*. Pemerintah belum memberi

perhatian besar pada program *social insurance* yang dapat mencegah individu dari risiko sosial-ekonomi yang dapat terjadi (Suharyo et al., 2009). *Social insurance* diberikan negara terbatas untuk aparat pemerintah, yaitu untuk PNS, TNI dan Polri.

Reformasi sistem keuangan negara secara signifikan mulai terjadi usai keluarnya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebagai pengganti ICW yang merupakan produk kolonial Belanda. Salah satu perubahan mendasar yakni dikenalnya klasifikasi belanja berdasarkan 11 fungsi, diantaranya Fungsi Perlindungan Sosial (FPS), Fungsi Pendidikan (FP), dan Fungsi Kesehatan (FK). Ini menunjukkan bahwa secara *de jure*, Indonesia tidak memasukkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai anggaran perlindungan sosial, meski secara *de facto*, Indonesia tetap mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Literatur modern memasukkan program pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial karena program tersebut dianggap sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat saat terjadi krisis dan bencana.

NK TA 2015-2019 mencatat FPS terbatas pada anggaran untuk individu atau rumah tangga miskin dan sangat miskin, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai/Rastra dan beberapa program lainnya. Sementara, alokasi anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidik Misi yang ada di Kemendikbud, Kemenristekdikti dan Kemenag dikategorikan dalam anggaran FP. Selanjutnya, untuk program-program terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dicatat sebagai anggaran FK.

Perluasan cakupan anggaran FPS

mulai dilakukan sejak TA 2016. Reklasifikasi belanja pemerintah pusat mencatat anggaran untuk subsidi pangan, subsidi bunga kredit perumahan, subsidi bantuan uang muka perumahan, cadangan beras pemerintah dan kontribusi sosial berupa dana pensiun dan tunjangan hari tua mulai masuk dalam anggaran FPS. Namun, untuk PIP, Bidik Misi, dan JKN-KIS tetap dicatat sebagai anggaran FP dan FK. Bahkan, dana cadangan untuk bencana alam justru masuk dalam anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan.

Implikasinya, pemerintah “terlihat” menaruh perhatian kecil terhadap sistem perlindungan sosial karena publik akan fokus pada alokasi anggaran FPS saja. Meski, pemerintah memberi perhatian “sangat besar” terhadap perlindungan sosial. Namun, alokasi anggarannya tercatat pada fungsi di luar perlindungan sosial. Bahkan, alokasi perlindungan sosial akan semakin besar, jika memperhitungkan anggaran beasiswa yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk kembali melakukan reklasifikasi anggaran berdasarkan fungsi, di mana sistem perlindungan sosial dimaknai tidak sekedar memberi uang pada orang miskin atau menyediakan obat bagi orang sakit. Lebih dari itu, sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi (*economic resilience*) dalam menghadapi ketidakpastian (bencana alam dan krisis) dan mencegah orang jatuh miskin.

Solusi berikutnya dengan melakukan *multi tagging budget analysis* sehingga anggaran untuk program-program seperti PIP, Bidik Misi, beasiswa LPDP, BOS, JKN-KIS, pensiun dan tunjangan hari tua serta penanggulangan bencana dapat dikategorikan sebagai anggaran FPS, selain FP, FK dan fungsi lainnya yang terkait.

Ilustrasi
A. Wirananda

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Magelang

Membuka Jalan Talenta Kepemimpinan

Magelang adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Bentang alamnya dikelilingi pegunungan dan terdiri dari bukit-bukit, menjadikan kota kecil di utara Yogyakarta ini terasa sejuk menenangkan.

Mungkin karena perpaduan cuaca dan kondisinya menyenangkan tersebut yang kemudian membuat kota ini dijadikan pusat pelatihan oleh banyak instansi di tanah air, sebut saja Akademi Militer. Alasan yang serupa kemudian diadopsi oleh Kementerian Keuangan. Kombinasi keadaan kota ini dianggap mendukung suasana pelatihan dan tentunya sangat tepat untuk mengkader lahirnya pemimpin yang nantinya akan mengawal kemajuan dari Kementerian Keuangan.

Adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BDPim) Magelang yang diapuk menjalankan tugas untuk membentuk karakter pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan ini diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984. Keppres tersebut mendasari perubahan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) berupa pemisahan Pusdiklat Pengawasan dari BPKP. Berdasar Keppres tersebut lahirlah Pusdiklat Pegawai yang menangani Pimpinan Administrasi (SEPA) dan Penataran Ketrampilan Manajemen (PKM) bertempat di Magelang Jawa Tengah.

Ketetapan pendirian BDPim Magelang tertuang dalam PMK No.52/PMK.01/2011.

Visi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang berlokasi tepat di jantung kota Magelang ini adalah menjadi pencetak SDM di bidang kepemimpinan yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung tugas mulia tersebut, lembaga ini didukung oleh tenaga ahli sebanyak 34 pegawai dan dibantu oleh 29 tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). "Kami semua berkomitmen menjadikan BDPim sebagai pusat pelatihan di bidang kepemimpinan yang dapat menjadi katalisator peningkatan kinerja stakeholders yang dilayani," tukas Endang Widajati , Kepala BDPim Magelang.

Peran dalam leaders factory

Kemenkeu *Leaders Factory* menjadi tema sentral dalam Inisiatif Strategis baru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK). Hal ini menjadi penjawantahan bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis yang menuntut peran tambahan Kementerian Keuangan di bidang keuangan negara. Keuangan Negara sendiri telah masuk ke dalam aspek-aspek di lintas

kementerian dan lembaga pemerintahan. Untuk itu, perlu kepemimpinan yang kuat dalam penyelenggaraan bidang tersebut dengan Kementerian Keuangan sebagai penggerak utamanya.

SDM di Kementerian Keuangan memiliki banyak potensi untuk menjadi pemimpin di bidang keuangan negara berskala nasional yang dapat berperan di luar Kementerian Keuangan. Solusinya, perlu disediakan jalur bagi *talent pool* berskala nasional untuk bisa berkiprah di luar institusi sebagai pemimpin di bidang Keuangan Negara. Sebagai ujung tombak pelatihan kepemimpinan, BDPim berperan menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin-pemimpin di bidang keuangan negara tidak hanya bagi Kementerian Keuangan tetapi juga bagi Kementerian/ Lembaga lain.

"Yang menjadi tantangan ke depan dengan Kemenkeu sebagai *leaders factory* adalah bagaimana BDPim dapat meningkatkan kapabilitasnya yang meliputi kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kepemimpinan dari setiap Kementerian/ Lembaga yang berbeda-beda *core bussines*-nya kemudian menyusun kurikulum yang tepat," jelas perempuan yang akrab dipanggil Endang



Kantor BDPim Magelang

Peserta Diklat Pimpinan saat mengikuti kelas

Endang Widajati, Kepala BDPim, menyerahkan penghargaan kepada peserta

Foto Dok. BDPim Magelang



ini. Lebih jauh ia berpendapat bahwa hasil penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tidak hanya untuk memenuhi *gap* kompetensi di bidang kepemimpinan, tetapi juga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan pembentukan jejaring kerja yang lebih luas demi tercapainya tujuan pelatihan tersebut.

Tantangan bukan rintangan

Bagi Endang yang baru menjabat sebagai Kepala BDPim Magelang sejak Februari 2019 lalu, tantangan untuk dapat terus menghasilkan kader-kader pemimpin yang berkualitas justru berasal dari dalam organisasi. Sebagai pengampu tanggung jawab tersebut, segenap jajaran di lembaga ini harus mau dan mampu untuk terus mematutkan diri. Caranya adalah dengan terus menyiapkan dan mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia yang ada. Baik tenaga fungsional maupun struktural, semua pihak harus dapat memenuhi tuntutan *stakeholders* tersebut.

Selain dari kecakapan SDM, BDPim Magelang juga terus berusaha untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana modern



berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut diharapkan dapat membantu proses pelatihan secara lebih akurat, cepat, murah, handal dan fleksibel. Kurikulum dengan konsep pembelajaran 10:20:70 digunakan dalam proses diklat bagi talenta yang dipersiapkan untuk berkiprah dalam skala nasional. Sepuluh persen pembelajaran terstruktur, 20 persen dalam bentuk *coaching*, konseling atau *mentoring*. "Porsi yang 70 persen didapat melalui *experience* lewat penugasan langsung. Dengan kurikulum tersebut kami berharap dapat terus mencetak kualitas pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Teks Dimach Putra



Jurusita Pajak pada KPP Pratama Bangka

Sabung Nyali Demi Negeri

Sejak menerima perintah penyanderaan pada pertengahan 2016, makan malam dengan tenang bersama keluarga adalah sebuah kemewahan bagi Fajar Nugroho. Baginya, berangkat dan pulang kantor melalui rute yang sama bisa setara maknanya dengan menggoda perkara. Periode ini diakuinya sebagai salah satu bagian terberat sepanjang sepak terjangnya menghimpun penerimaan negara. "Istri saya juga pas hamil tua saat itu," katanya saat menceritakan gelapnya masa itu baginya.

Bertahun Menunggak

Tak berselang lama usai dilantik sebagai Jurusita Pajak, Fajar digelayuti beban berat dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara. Salah satu wajib pajak

badan usaha di wilayahnya menunggak pembayaran pajak dengan nilai mencapai 40 miliar rupiah. Angka tunggakan ini terbilang besar di wilayah KPP Pratama Bangka. Tunggakan ini bukan baru saja terjadi, melainkan tunggakan pada tahun pajak 2012 dan 2013. Fajar yang masuk menjadi Jurusita di KPP Bangka pada 2015, bertugas melanjutkan penanganan kasus tunggakan pajak nan tak kunjung usai itu.

"2015 (saya) masuk, seluruh proses tindakan penagihan sampai dengan surat paksa sudah berjalan (oleh petugas sebelumnya). Penyitaan dimulai," katanya bercerita. "Kita blokir rekening perusahaan, dan orang pribadi pengrusnya. Tetap tidak ada itikad baik." Sedari mula, penanggung pajak ini resisten dan tidak kooperatif dengan petugas. Sejak proses pemeriksaan sampai penagihan, badan usaha ini

cenderung melakukan penghindaran dengan beberapa kali merombak susunan kepengurusannya. Beruntung, pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak memberikan dukungan sepenuhnya terkait penagihan ini. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan terkait di wilayah kerjanya, Kepala KPP Pratama Bangka merespons situasi itu dengan perintah penyanderaan.

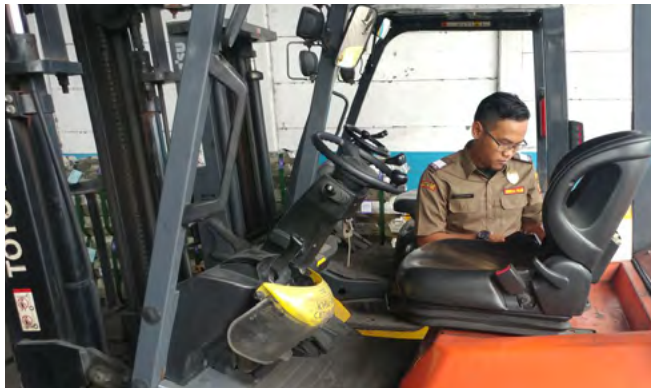
Maret 2016, izin melaksanakan penyaderaan disetujui oleh Menteri Keuangan. "Canggihnya, pada April 2016, badan usaha itu melakukan perubahan kepengurusan. Orang itu (orang yang ditunjuk sebagai sandera) sudah melepaskan kedudukannya," Fajar bercerita. "Namun masih ada klausul (pada peraturan perundang-undangan) bahwa ia tidak serta merta lepas begitu," ia melanjutkan.

Menjelang pelaksanaan penyanderaan, KPP Pratama Bangka mengetatkan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, serta Badan Intelijen Negara di wilayah setempat. Kerja sama ini sebagai dukungan keamanan bagi Jurusita yang bertugas, pun karena sandera yang menjadi target merupakan warga negara asing.

Perburuan Melelahkan

Mendekati hari penyergapan, Fajar ditemani petugas dari BIN mulai intens melakukan penjejakn dan pendalaman. Satu dua kali informasi masuk menyatakan target masuk Bangka. Setelah ditelusur lebih jauh, rupanya bukan orang yang dimaksud.

"Setelah A1 dia masuk Bangka, kami langsung dalam. Bersama anggota dari BIN, kami ikuti dia. (Pengintaian) sehari semalam waktu itu," katanya mengenang. "Dia masuk ke perkampungan di Bangka Tengah. Malamnya, baru kami dibantu anggota intelijen Korem (Komando Resor Militer). Pagi (hari berikutnya) kami mulai



Fajar Nugroho, Jurusita Pajak KPP Pratama Bangka

Fajar melakukan penyitaan

Foto
Anas Nur Huda

Foto
dok. Pribadi

bergeser posisi sambil terus melakukan pengintaian dan berjaga di persimpangan-persimpangan jalan yang diyakini akan dilewati orang itu ketika pergi," Fajar melanjutkan ceritanya.

Pada saat yang hampir bersamaan, secara paralel, para pimpinan di wilayah merapat dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk permintaan bantuan resmi. Sesaat sebelum rombongan pimpinan tiba, target dan rombongannya keluar dari rumah yang ditempati. Seorang rekan Fajar berusaha membuntuti namun kehilangan jejak. Tak lama kemudian, di rumah yang baru saja ditinggalkan, rombongan pimpinan beserta pihak kepolisian tiba untuk menyergap. Mereka memaksa masuk untuk melakukan pengeledahan. "Mereka yang beratribut lengkap ya masuk *aja tuh*. Kami di luar saja," kata pria kelahiran Karanganyar ini. Setelah gagal ditemukan, rombongan pimpinan memutuskan menghadang di Pangkalpinang. "Kita cekat pintu keluarnya saja," katanya menirukan perintah pimpinan saat itu.

"Kami mampir beli es kelapa muda. Tapi justru saat kami minum es kelapa muda itu, mobil target melintas," Fajar mengikuti mobil itu sambil tetap memonitor perkembangan penyergapan. Sepanjang pengejaran, Fajar menerima informasi bahwa target melintas ke arah yang sama dengan Fajar menggunakan mobil lain. Beruntung, mobil itu ada di belakang mobil yang dikemudikan Fajar. "Kaca mobil itu bening, jadi kami bisa lihat dari kaca belakang. Bener, orang itu di dalam. Duduk santai. Keliatan itu," katanya sambil terkekeh mengenang kejadian saat itu. Sambil terus berkoordinasi dengan rombongan pimpinan, akhirnya target berhasil ditangkap sore itu.

Sandera kemudian dibawa ke kantor untuk dibacakan surat paksa dan surat perintah sandera. Selanjutnya sandera tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan setempat. Usai enam bulan berselang, perusahaan penanggung pajak tersebut berkenan membayar pajak. Fajar berterima kasih atas dukungan penuh dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak baik di pusat ataupun wilayah sepanjang proses penyanderaan.

Tentang Pengabdian, Tentang Kasih

Sejak penyanderaan itu, Fajar kerap diterpa cemas. Lebih dari sebulan ia mengkhawatirkan situasi pasca penyanderaan. Saat itu, kandungan istrinya memasuki usia delapan bulan. Di satu sisi ia mengabdikan dirinya, di sisi lain ia terpaksa merelakan kasihnya terbagi. Demi negeri. "Saya bersyukur istri saya tangguh. Dia lebih banyak sendiri waktu itu," katanya mengenang.

Fajar berharap profesinya lebih mendapatkan apresiasi. Ia lantas menceritakan kenangan kelam tiga tahun silam, saat Parada gugur dalam tugas sebagai Jurusita di Nias. Ia berharap kejadian itu dapat diperingati untuk menghargai jasanya sekaligus mengingatkan risiko nyata yang dihadapi Jurusita Pajak.

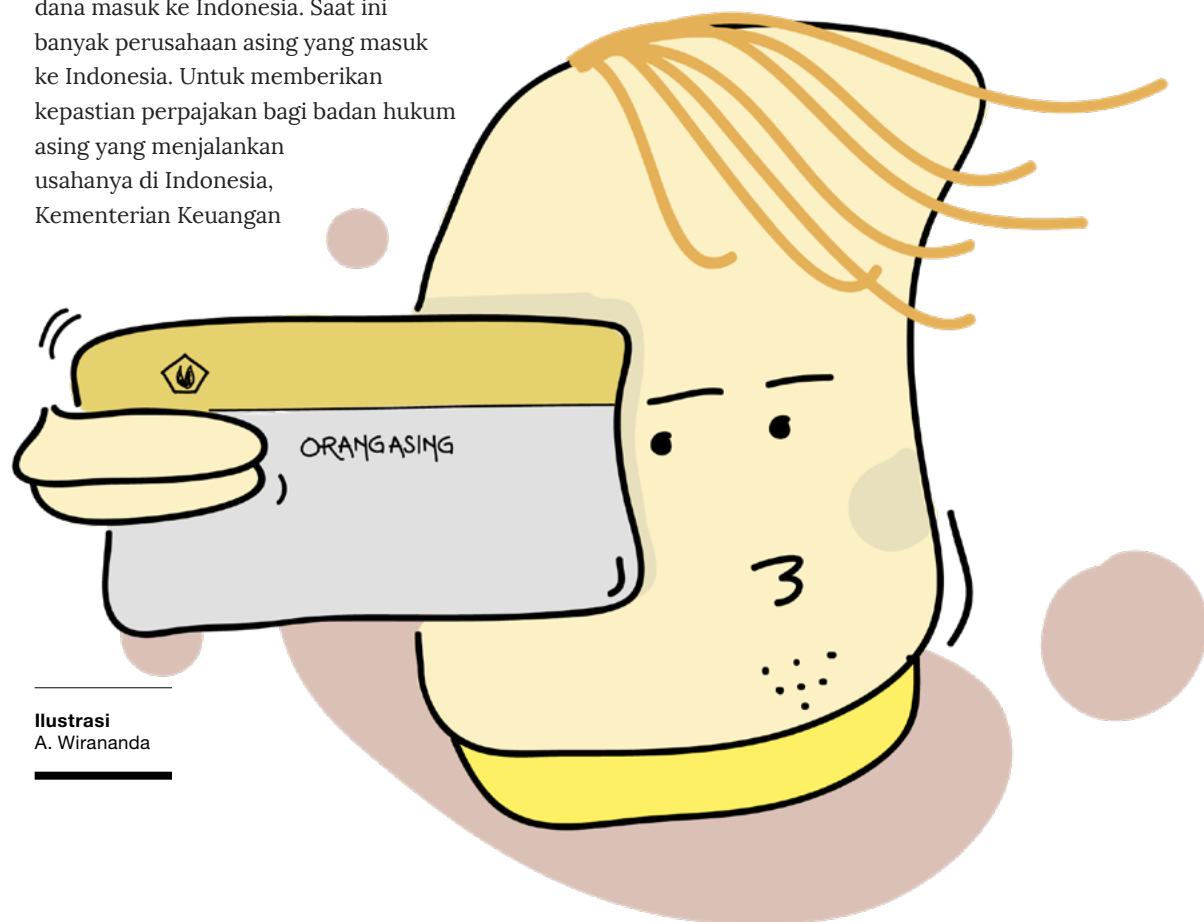
Teks A. Wirananda

Masuk Kriteria Bentuk Usaha Tetap, Orang dan Badan Asing Wajib Miliki NPWP

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Bentuk Usaha Tetap

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah mendorong perusahaan asing untuk mau berinvestasi menanamkan modalnya ke tanah air. Berbagai insentif dikeluarkan pemerintah agar aliran dana masuk ke Indonesia. Saat ini banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Untuk memberikan kepastian perpajakan bagi badan hukum asing yang menjalankan usahanya di Indonesia, Kementerian Keuangan

telah menerbitkan aturan tentang subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Aturan mengenai bentuk usaha tetap ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.



Ilustrasi
A. Wirananda

Sebulan Beroperasi, Wajib Buat NPWP

Hal utama yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.03/2019 yaitu memperjelas kewajiban perpajakan bagi orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Dalam pasal 2 PMK Nomor 35/PMK.03/2019 disebutkan bahwa orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut wajib dibuat sebulan setelah orang pribadi asing atau badan asing beroperasi di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah berhak menerbitkan NPWP secara jabatan.

Perjelas Kedudukan BUT

PMK Nomor 35/PMK.03/2019 juga mengatur mengenai kriteria bentuk usaha tetap yaitu adanya suatu tempat usaha atau *place of business* yang bersifat permanen, yang digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Selanjutnya dalam PMK Pasal 5 ayat (4) ini diatur bahwa tempat usaha atau *place of business* dimaksud yaitu sepanjang tersedia untuk digunakan, sehingga orang pribadi asing atau badan asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, dan sepanjang orang pribadi asing atau badan asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat usaha tersebut.

Bentuk usaha yang juga merupakan bentuk usaha tetap, namun tidak memenuhi kriteria adanya suatu tempat usaha atau *place of business* yang bersifat permanen, meliputi (1) proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, (2) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, (3) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, dan (4) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, namun menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Kegiatan usaha yang masuk dalam kriteria bentuk usaha tetap mencakup segala hal yang dilakukan dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Selain penegasan tentang tempat kedudukan, PMK ini juga memberikan pengecualian dan membatasi bahwa sepanjang tempat usaha di Indonesia hanya digunakan untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik oleh orang pribadi asing atau badan asing dan orang pribadi asing atau badan asing yang memiliki akses yang terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut, maka tempat usaha tersebut tidak termasuk dalam kategori '*place of business*' dalam ketentuan bentuk usaha tetap. Klausul mengenai kriteria tempat usaha dibuat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional, utamanya mengenai kriteria tempat usaha yang tidak memenuhi kriteria umum sebagai bentuk usaha tetap.

Mengakhiri Pro dan Kontra BUT

Aturan bentuk usaha tetap akan mengakhiri pro dan kontra penafsiran ketentuan mengenai kategorisasi bentuk usaha tetap dalam rezim perpajakan domestik. Dengan keluarnya aturan baru ini, perusahaan *Over The Top* (OTT) asing dianggap sebagai bentuk usaha tetap dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sebelumnya, OTT asing yang beroperasi di Indonesia dianggap hanya mengambil keuntungan dari pasar dalam negeri tanpa dikenakan kewajiban perpajakan seperti korporasi pada umumnya. Aturan ini memberikan keadilan karena adanya persamaan *level of playing field* baik untuk usaha asing maupun usaha domestik.

Penutup

Terbitnya PMK Nomor 35/PMK.03/2019 memberikan suatu kepastian hukum terhadap kriteria bentuk usaha tetap yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan. Kejelasan aturan hukum merupakan salah satu prasyarat utama bagi investor asing yang akan masuk ke Indonesia.

Adanya kewajiban untuk memiliki NPWP memberikan dampak bagi bentuk usaha tetap untuk tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sebagai bentuk usaha tetap, perusahaan asing atau orang asing tentunya juga harus tunduk kepada ketentuan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara atau yurisdiksi mitra.

Teks Budi Sulistyono

Energi untuk Bumi

Isu energi dan lingkungan hidup telah mulai disadari oleh banyak orang. Namun, tidak banyak yang mau berupaya menjadi bagian dari solusi. Satya Hangga Yudha Widya

Putra adalah salah satu anak bangsa yang bersedia mengambil peran itu. Bersama dengan sang kakak, pemuda lulusan New York University pada 2017 silam ini, mendirikan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I). Sebuah organisasi nonprofit di bidang energi dan lingkungan hidup yang visi utamanya adalah mencegah dan mengendalikan pemanasan global serta perubahan iklim, khususnya di Indonesia.

Melalui IE2I, Satya bersama tim menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama mencari alternatif solusi atas masalah-masalah yang muncul di sektor energi dan lingkungan hidup. “Kita hadir di konferensi-konferensi, (baik) di Indonesia dan luar negeri. Kita bertemu dan berpresentasi di depan banyak sekali pemimpin negara, politisi, pejabat, pengusaha-pengusaha, (termasuk juga)

anak-anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi,” ungkap pemuda yang menamatkan program masternya melalui beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini.

IE2I juga menggelar beragam acara dan aktivitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah energi dan lingkungan hidup. “Salah satu *project* yang kita pernah lakukan namanya “Beach Clean Up” yang diadakan di Mangrove Center Tuban,” kisah Satya.

Saat itu, IE2I berkolaborasi dengan Pertamina mengajak serta para pelajar dari empat sekolah. Dua sekolah menengah pertama (SMP) dan dua sekolah menengah atas (SMA). “Kita presentasi mengenai apa sih pemanasan global, apa sih perubahan iklim, dan pentingnya untuk membuang sampah di tempat,” kenangnya. Pada acara tersebut, Satya dan tim tidak hanya melakukan edukasi, tetapi juga bergotong-royong mengumpulkan sampah di sekitar pantai.

Isu energi dan lingkungan

Ketertarikan Satya pada masalah

energi dan lingkungan hidup sebenarnya telah muncul sejak duduk di bangku sekolah menengah. Meski demikian, ilmu yang ia dalami lebih mengarah kepada bidang sosial. “(Semasa SMA), saya mengambil mata pelajaran ekonomi, *business management*, dan *environmental studies*,” ungkapnya.

Itu pula sebabnya pada tingkat sarjana, Satya memilih untuk mengambil jurusan ekonomi sebagai basis. Barulah pada tingkat pascasarjana, dirinya menekuni bidang kebijakan energi dan lingkungan hidup. “(Jadi) lebih ke *policy*,” ujar pemuda yang memperoleh gelar sarjananya di Michigan State University pada 2015 ini.

Sumber energi terbarukan

Alasan Satya mendalami bidang energi dan lingkungan hidup tidaklah sederhana. Menurutnya, kedua bidang ilmu tersebut berjalan beriringan. “Kita tidak bisa fokus pada lingkungan hidup saja, tanpa mempelajari energi,” jelasnya.

Sebab, Satya menuturkan, Indonesia

lpdp Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. 1500652
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

adalah salah satu negara yang memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dalam memproduksi energi listrik. “(Sebanyak) 87 persen penghasilan listrik Indonesia dihasilkan dari bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas,” katanya.

Atas alasan itulah, Satya menyuarakan perlunya beralih ke sumber energi terbarukan yakni *environmental friendly*. Misalnya pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan hidro. “Ada juga biodiesel, biofuel, biomass, dan biogas,” sebutnya.

Selain itu, Satya juga menyampaikan pentingnya beralih ke transportasi yang digerakkan oleh energi listrik. Hal ini berguna untuk menggantikan alat transportasi yang selama ini masih menggunakan bahan bakar fosil. Menimbang kebutuhan negara akan para ahi di bidang energi dan lingkungan hidup ini men jadi alasan kuat bagi Satya untuk melanjutkan pendidikan master di bidang yang sama.

Menimba pengalaman

Gambaran tentang Amerika Serikat (AS) sebagai negara maju telah terpatrit di benak Satya sejak di bangku SMA. Itu sebabnya, gelar sarjana dan master dia harap bisa diperoleh dari negeri Paman Sam tersebut. Melalui beasiswa LPDP, Satya merealisasikan mimpinya untuk menempuh pendidikan pascasarjana di New York University.

Kedinamisan Kota New York menjadi salah satu alasan Satya memilih univesitas

ini. Hal ini tidak mengherankan karena kota New York kerap disinggahi berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang. Sebut saja para pemimpin negara, politisi dunia, pengusaha, serta para pejabat yang melaksanakan kunjungan kerja. “Setiap kali mereka mengunjungi New York, mereka juga mengalokasikan waktu untuk menjadi pembicara di berbagai macam perguruan tinggi di berbagai macam acara,” ujar Satya.

Tentu saja, kesempatan tersebut tidak disiakan oleh Satya. “Saya bisa hadir di acara-acara itu, (sekaligus) ngobrol langsung dengan mereka,” ungkapnya. Satya meyakini, pertemuan dengan banyak orang bisa memperluas wawasan, pergaulan, hingga jaringan.

Tidak heran, selain berburu beragam acara di kota New York, Satya terlibat aktif pada sejumlah organisasi di dalam dan luar kampus. Salah satu yang berkesan saat dirinya menjadi *editor* hingga *managing director* pada sebuah *foreign policy journal* di kampusnya, yaitu Persepective on Global Issues.

Berbagi tips

Satya berbangga hati tatkala pendidikan yang ia jalani didukung penuh oleh beasiswa LPDP. Apalagi pendidikan yang dia jalani bukan semata untuk kepentingan pribadi. “Tetapi untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” tegasnya. Melalui beasiswa ini juga, keterikatan hatinya dengan negara semakin tinggi.

Lolos dalam seleksi beasiswa LPDP dinilai Satya sebagai capaian membanggakan. Kompetisi antarpada pelamar potensial jadi tantangan. Agar tidak gagal, sejak jauh-jauh hari Satya telah mengantongi *acceptance letter* dari universitas yang dia dituju. Hal ini berguna sebagai nilai tambah saat seleksi.

Selain itu, sesi wawancara dan *leader grup discussion* juga tidak kalah penting. “Kita harus bisa bekerjasama, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. (Termasuk) menjaga emosi,” ujarnya.

Berpengaruh besar

Satya menaruh harapan besar agar organisasi IE2I bisa memperluas kolaborasinya dengan lebih banyak pihak. “Dengan BUMN, swasta, dan pemerintah,”sebutnya. Selain itu, dia berharap kerja kerasnya bisa memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu-isu di sektor energi dan lingkungan hidup. Hingga saat ini, IE2I telah melakukan banyak proyek di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Pada akhir wawancara, Satya mengungkapkan keinginannya melanjutkan pendidikan doktor di LPDP. “Untuk bisa memperluas wawasan saya dan jadi orang profesional yang bisa berkontribusi banyak terhadap negara,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi

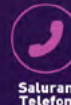
Bersama keluarga saat kelulusannya dari NYU

Pada salah satu acara yang digagas oleh IE2I

Foto dok. Pribadi



Layanan apa yang bisa Kamu dapat dari Kring Pajak?



Saluran
Telefon



Live
Chat



@kring_pajak

Layanan Lupa EFIN

*EFIN dikirim dalam bentuk .PDF ke email terdaftar

Informasi NTPN

Pengaduan

Layanan Konfirmasi Kebenaran SKF

Pembuatan Kode Billing

Konsultasi Perpajakan

Kode Verifikasi Pengiriman SPT



1 500 200

www.pajak.go.id

Bugar



Foto
Anas Nur Huda

Ilustrasi
A. Wirananda

Mengontrol Gula Darah dengan Diet DM

dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Diabetes melitus (DM) atau yang sering disebut kencing manis merupakan gangguan metabolisme akibat sel insulin yang tidak sensitif terhadap kenaikan kadar gula darah di dalam tubuh. Diet makanan seimbang sangat dianjurkan bagi penderita diabetes atau yang memiliki risiko diabetes. Tata cara diet ini hampir sama dengan anjuran makan pada umumnya, hanya saja lebih ditekankan pada keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan. Prinsip utamanya yakni pilih makanan yang memiliki kadar gula rendah.

Dalam diet DM, sumber karbohidrat didapat dari roti gandum, nasi merah, jus apel tanpa pemanis, kacang kedelai, ubi panggang, *oatmeal*, dan biji-bijian

utuh. Sementara, sumber protein dapat diperoleh dari daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit.

Hindari daging-daging yang telah mengalami proses olahan pabrik seperti kornet, sosis, dan *nugget*.

Sebaiknya konsumsi sayur mayur yang direbus, dikukus, dipanggang, atau masih mentah. Brokoli dan bayam paling dianjurkan untuk penderita diabetes. Adapun untuk buah-buahan, seluruh buah segar dianjurkan, tetapi batasi konsumsi nanas, anggur, mangga, sirsak, sawo, semangka, nangka masak, dan alpukat. Hindari pula buah-buahan kaleng atau yang telah diberi pemanis.

Yang pasti, hindari minuman beralkohol, susu kental manis, minuman bersoda, es krim, yogurt rasa buah, dan susu *full cream*. Namun, perlu juga diketahui bahwa konsumsi *plain* yogurt aman dan tidak mempengaruhi tingginya kadar gula di dalam tubuh. Langkah lainnya ialah mengganti gula pasir dengan selain gula tebu. Bagi yang memiliki risiko diabetes, batasi konsumsi gula pasir maksimal

4 sedok makan/hari (termasuk dalam masakan, kue dan minuman). Pembatasan lain juga perlu diterapkan untuk makanan yang digoreng, menggunakan santan kental, saus tiram, atau kecap manis.

Bulan puasa menjadi saat yang baik bagi penderita DM lantaran konsumsi makanan dibatasi selama 12 jam. Akan tetapi, tingkatkan kewaspadaan pada waktu berbuka. Hindari makanan dan minuman manis berlebihan. Kurma matang beberapa butir saat berbuka dan sahur dapat menjadi pilihan yang baik. Buah kurma memiliki kadar kalori dan gula yang baik bagi penderita diabetes.

Sebaiknya obat-obatan diabetes tetap dikonsumsi, tetapi aturannya akan “berubah”. Konsultasikan ke dokter tentang cara penggunaan obat selama bulan puasa bagi penderita diabetes dengan lebih dari 1 obat atau aturan lebih dari 1x dalam sehari untuk memaksimalkan efek obat selama berpuasa.

Meninggal (Kan)

Foto
Resha Aditya

Kematian itu dekat. Kita tahu. Namun, kita seperti melupakan. Masih ada hari esok, seminggu lagi, sebulan, setahun, hingga bertahun-tahun. Demikian, sangka(l) kita.

Padahal, kematian tak bisa dihindari. Tak bisa juga diganti. Maka, apakah kita telah mempersiapkan diri?

Beberapa waktu lalu, saya dan rekan-rekan kantor dikejutkan dengan kabar kematian salah seorang rekan. Almarhum adalah rekan satu subbagian kami. Usianya tak terpaut jauh dengan saya. Pada awalnya, kami seperti tak percaya. Sebab, baru beberapa jam lalu dia berinteraksi dengan kami melalui grup WhatsApp kantor. Namun, Tuhan menggariskan, bahwa saat itu adalah waktunya berpulang. Haru dan sedu begitu cepat menjalar. Doa terbaik pun dipanjatkan.

Saat seorang sahabat lebih dahulu meninggalkan, kita kembali diingatkan. Pada saatnya nanti, kita pun akan mengalami. Meregangnya nyawa dari raga hanya terjadi sekali di dunia. Tak akan berulang layaknya ujian apabila kita gagal. Namun, kita seperti tak pernah benar-benar mempersiapkan. Padahal saat itu

adalah saat-saat penuh perjuangan.

Beruntung, jika saat itu datang, kita berada di dekat-dekat orang yang kita kasihi. Beruntung, jika saat nyawa meregang, kita berada di waktu yang diberkahi. Beruntung, jika saat detik-detik kematian, kita mengesakan Ilahi.

Maka, setelah kematian datang, segala proses yang perlu dijalani begitu cepat. Mulai dari dimandikan, dikafani, dan disholati, hingga pemakaman dilangsungkan. Lalu, dalam hitungan sekian hari saja, rutinitas dunia kembali berjalan normal. Ucapan belasungkawa yang sempat berseliweran di berbagai media sosial dan grup WhatsApp mulai berganti dan dipenuhi dengan *chit-chat* lain terkait pekerjaan, *jokes* receh, atau *sharing* yang katanya berasal dari grup sebelah.

Pada akhirnya kita pun tergantikan. Posisi yang sebelumnya kita bangga-banggakan. Pekerjaan yang membuat kita jumawa dan berpikir orang lain akan merasa kehilangan dan kewalahan saat bukan kita yang pegang. Namun, nyatanya saat itu, mampu digantikan oleh lain orang.

Maka, kematian adalah konsekuensi logis dari kehidupan. Sayangnya, kita seringkali takut untuk berbincang tentang

kematian. Alasannya, topik kematian membuat semangat berkarya yang sebelumnya bergelegak, menjadi buyar.

Jika pekerjaanku hanya sementara, untuk apa bersusah-payah mengerjakan? Toh pada saatnya nanti, pekerjaanku akan ada yang menggantikan. Jadi, buat apa bekerja ekstra?

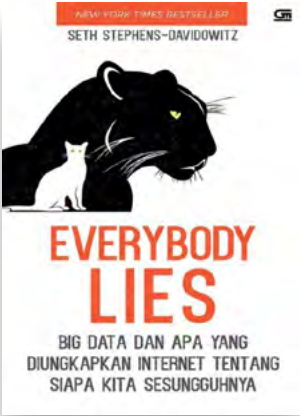
Boleh jadi, pertanyaan kekhawatiran itu benar. Namun, mengapa kita tak berpikir sebaliknya?

Bukankah amanah yang sementara ini justru memacu kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya? Bukankah dengan ada pengganti kelak, kita bisa menghadiahkan legacy yang berharga untuk mereka?"

Ingatlah, di detik waktu yang belum kita tahu kapan, kita tak akan lagi punya kesempatan. Pada waktu yang akan datang, kita pun akan digantikan. Namun, apa yang telah kita kontribusikan saat ini, selalu ada ruang baginya untuk dikenang. Maka di titik ini, tebersit sebuah tanya, “Sebelum meninggal, kita meninggalkan apa?”

Teks Arif Musafa

Mari Melihat Dunia Yang Sesungguhnya



Dunia saat ini sudah memasuki era digital. Seringkali pembahasan solusi untuk suatu masalah dipecahkan dengan mengolah dan menganalisa *Big Data*.

Namun tahukah Anda bahwa data yang dimiliki mesin pencari Google seringkali menunjukkan hal yang berbeda dengan data yang muncul di percakapan media sosial? Ya, menurut buku *Everybody Lies: Big Data dan Apa Yang Diungkapkan Internet Tentang Siapa Kita* Sesungguhnya karya Stephens-Davidowitz mengungkapkan bahwa pada dasarnya sifat manusia senang berbohong. Maka tak heran, sebagian besar manusia tidak berbicara jujur agar dapat diterima secara sosial, terutama untuk percakapan tentang hal-hal yang sensitif. Seth malah meyakini perilaku manusia yang sebenarnya dapat ditunjukkan melalui perilaku orang di mesin pencari Google. Oleh karena itu, Seth mengungkapkan bahwa data-data

pencarian di Google selalu lebih akurat dibandingkan hasil survei manapun yang dilakukan para ahli. Sebagai contoh ketika Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, media dan opini sebagian besar masyarakat dunia menyebutkan bahwa ini merupakan fenomena demokrasi dan kesetaraan manusia tanpa memandang ras. Tapi kenyataannya, Google mencatat hal yang berbeda. Ketika Obama terpilih, kata yang paling sering diketik di Google adalah kata-kata rasis.

Begitulah perilaku manusia diungkap oleh Seth. Orang-orang yang nampak normal dan baik-baik saja di dunia nyata, ketika berhadapan dengan Google, mereka akan menjadi dirinya sendiri, yang bisa jadi mengungkap hal yang berbeda. Semua data tersebut Seth kumpulkan dari hasil penelitian *Big Data* melalui Google Trends.

Seth berpendapat bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan jawaban riil seseorang untuk mendapatkan sebuah

informasi, data, atau hasil survei yang akurat. Beruntung, di era internet seperti sekarang, kita tidak lagi harus bergantung pada jawaban riil seseorang. “Kita bisa menggunakan *Big Data*. Data dari *internet* yang menelusuri kepingan informasi yang ditinggalkan miliaran orang di Google, media sosial, situs perjodohan, dll. Semua data-data itulah yang akan membongkar kebenaran,” paparnya.

Seth merupakan seorang data scientist di Google. Dia meraih PhD bidang ekonomi di Harvard. Buku inipun ditulis dengan ringan menski berbicara mengenai *Big Data* karena Seth sendiri merupakan seorang kolumnis New York Times. Ulasan menarik tentang bagaimana membaca pikiran manusia melalui perilaku mereka di internet berhasil dibahas secara apik oleh Seth Stephens-Davidowitz dalam bukunya yang berjudul *Everybody Lies*.

Peresensi Hega Susilo

Judul: Everybody Lies : Big Data dan Apa Yang Diungkapkan Internet Tentang Siapa Kita Sesungguhnya Pengarang: Seth Stephens-Davidowitz Tahun terbit: 2017 Dimensi: 315 Halaman	Buku ini dapat dibaca di:  Perpustakaan Kementerian Keuangan Kunjungi Perpustakaan Kemezterian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat  Perpustakaan Kemenkeu  Perpustakaan Kementerian Keuangan  @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id	Buku Pilihan Perpustakaan Kementerian Keuangan RI: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat Mark Manson Generasi X, Y, & Zoomeri Cheryl Cran Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Marchella FP Memorizing Line an Elephant Yudi Lesmana Ouliers: Kisah di Balik Suskes Malcolm Gladwell
--	--	---



Menikmati Bau Peapi

Foto
Dok. Pribadi

Mencicipi Bau Peapi dari Sulawesi

Pernahkah Anda berkunjung ke Sulawesi Barat? Provinsi termuda di Pulau Sulawesi ini memiliki masakan olahan ikan yang tidak ditemui di tempat lain. Namanya bau peapi, masakan khas suku Mandar yang sangat kaya gizi. Suku Mandar merupakan suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari Polewali di selatan hingga Pasangkayu di utara.

Bau berarti ikan sedang, sementara peapi bermakna dimasak. Ikan yang diolah untuk masakan bau peapi biasanya cakalang atau tuna. Masakan ini menggunakan bumbu cabai rawit, merica, garam, minyak kelapa, bawang mandar atau bawang merah, kunyit, air secukupnya, serta asam mangga. Cara membuatnya sederhana: haluskan bumbu, campurkan dengan ikan, lalu masak semua bahan dalam wadah yang orang Mandar biasa pakai bernama kawali. Kawali berbentuk seperti wajan, tetapi berbahan tanah liat. Masak hingga aroma wangi menguar.

Rasa khas yang membedakan bau peapi dari masakan olahan ikan lainnya adalah cita rasa asam. Bila selama ini cita rasa asam yang kita temui pada masakan daerah lain diperoleh dari jeruk nipis, jeruk lemon, ataupun cuka, tidak demikian dengan masyarakat suku Mandar. Mereka menggunakan olahan mangga muda sebagai bahan untuk memperoleh cita rasa asam. Nama olahannya dikenal dengan asam mangga. Rasa asam alaminya tidak terlalu tajam dibanding jeruk atau cuka, tetapi lebih kuat dibanding asam jawa.

Proses pembuatan cita rasa asam dilakukan dengan mengupas mangga muda, lalu menjemurnya selama beberapa hari hingga kering dan berubah warna. Setelah berwarna hitam kecokelatan, olahan mangga muda baru bisa digunakan. Asam mangga tak bisa lagi dimakan begitu saja setelah mengalami proses penjemuran. Bahan tersebut hanya bisa digunakan sebagai pelengkap atau bumbu masak.

Pantai Lombang-Lombang di Mamuju menjadi salah satu tempat terbaik menikmati bau peapi. Harga tiket masuk ke pantai ini hanya Rp2.000 per orang. Sebelum memasuki kawasan pantai, kita akan melewati hutan bakau yang dihubungkan dengan jembatan kayu. Terdapat banyak penjual kuliner yang menjajakan bau peapi di pantai yang dekat dengan Bandara Tamba Padang Mamuju ini.

Kita bisa menikmati bau peapi sambil duduk-duduk di pondok-pondok yang telah disediakan. Bau peapi biasa dimakan bersama nasi atau jepa (roti pipih yang terbuat dari bahan singkong dan parutan kelapa khas suku Mandar). Jepa berwarna putih kecokelatan dan beraroma singkong bakar. Untuk minuman, kita dapat memesan air kelapa muda yang banyak tersedia di pantai. Harga seporsi bau peapi sekitar Rp60.000 dan cukup untuk dua orang. Nikmat dan mengenyangkan. Cobalah bau peapi saat mengunjungi Sulawesi.

Teks Endro D. Subandono



Andhika Diskartes,
Perencana Keuangan, founder *diskartes.com*,
dan penulis buku *Investory* dan buku
Investory "X".

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, disadari atau tidak, perilaku ekonomi masyarakat Indonesia berubah ketika bulan suci umat Islam mulai mendekat. Yang menambah pelik, masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang malah pusing mengatur keuangannya ketika Ramadan tiba.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor yang paling sering dikeluhkan di bulan Ramadhan hingga hari lebaran adalah harga barang yang melonjak. Di sisi lain, tradisi mudik berdampak pula terhadap peningkatan kelangkaan moda transportasi karena permintaan yang melonjak tanpa dipenuhi oleh penawaran moda alternatif. Untuk beberapa orang yang super tajir, hal itu bukan masalah yang berarti. Lain cerita bagi kaum pendapatan menengah yang baru meniti karir atau mereka yang penghasilannya masih di sekitar upah minimum. Mereka perlu bersiasat mengatur keuangannya. Lalu, bagaimana tips dan strateginya?

Tips pertama adalah mengelola bonus hari raya. Bagi yang mendapat bonus Tunjangan Hari Raya (THR), Anda akan sangat bijak jika “mengabaikannya” terlebih dahulu. Misalnya saja, diperkirakan pada bulan puasa Anda berpotensi memperoleh tambahan Rp20 juta. Dengan tambahan sekian puluh juta itu, Anda tidak perlu turut mengubah gaya hidup karena hal itu hanya akan berdampak pada inflasi yang

semakin cepat naik. Penyebabnya, para pedagang akan berfikir bahwa berapapun harganya akan bisa dibeli konsumen. Sementara itu, anggapan karyawan yang bisa beli apa saja dengan tambahan bonus juga salah kaprah. Bukankah intisari dari puasa adalah menahan hawa nafsu? Analogi yang

Persiapan Keuangan Menjelang Ramadan

sama juga berlaku. Ketika memperoleh THR, Anda juga dituntut tidak boleh terbuai oleh nafsu belanja.

Tips kedua, Anda dapat menambah pemasukan saat bulan Ramadhan. Jika Anda termasuk golongan *freelancer* yang tidak memperoleh THR, Anda dapat membuat THR Anda sendiri. Caranya,

ketika pemasukan bulanan melebihi target yang ditentukan, Anda sisihkan untuk Tunjangan Hari Raya Anda sendiri. Jangan lupa mengalokasikan dana untuk zakat dan sedekah ya mumpung di bulan puasa.

Selain itu, Anda bisa menambah pemasukan dari bisnis skala kecil, seperti menjual gorengan, minuman takjil, busana muslimah, dan lainnya. Dengan penjualan temporer tersebut, Anda dapat memperoleh tambahan gaji yang lumayan lho!

Tips ketiga, Anda perlu mengesampingkan gengsi saat pulang kampung, namun tetap berikan penampilan yang terbaik. Saya sangat tidak menyarankan Anda untuk menjadi orang pelit karena pembatasan uang. Tidak pula menganjurkan untuk menjadi orang yang keliatan keren saat mudik ke kampung halaman. Yang perlu Anda lakukan adalah tampilkan yang terbaik yang bisa Anda lakukan tetapi tidak berlebihan. Misalnya, ketika ingin pulang kampung bersama-sama, silakan saja menyewa mobil untuk beberapa orang. Justru hal tersebut akan membuat lebih efisien. Dengan begitu, Anda dapat menyisihkan uang kepada para keponakan. Aturannya, tak perlu banyak namun cukup layak menurut diri Anda sendiri. Bila Anda merasa tidak bisa memberi uang karena habis untuk transportasi, jangan berkecil hati. Anda masih bisa mentraktir makan semampunya.

Mas Praim



“AKIBAT KALAP MAKAN BUKA”

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





HARI KELUARGA INTERNASIONAL
15 MEI 2019

Foto: Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA